

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), TEMUAN  
AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI**

**(Studi Kasus Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur**

**Tahun 2021-2023)**

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Persyaratan

Dalam Meraih Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Akuntansi Syariah



**Disusun Oleh:**

**TUTI AGUSTIN**

**NIM 2105046132**

**AKUNTANSI SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2025**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Tuti Agustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melakukan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari:

Nama : Tuti Agustin

NIM : 2105046132

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Periode Tahun 2021-2023)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

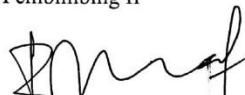
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Fauzi, S.E., M.M.  
NIP. 197302172006041001

Pembimbing II

  
Irma Istariani, S.E., M.Si.  
NIP. 198807082019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Tuti Agustin

NIM : 2105046132

Judul : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEMUAN AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI  
(Studi Kasus Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2021-2023)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 13 Maret 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 14 April 2025

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198909242019032018

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhammad Fauzi, S.E., MM.  
NIP. 197302172006041001

Penguji I

  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag.  
NIP. 197108301998031003

Penguji II

  
Azizatur Rahma, M.A.  
NIP. 199406152020122011

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Fauzi, S.E., MM.  
NIP. 197302172006041001

Pembimbing II

  
Irma Istiariani, M.Si  
NIP. 198807082019032013

## **MOTTO**

لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah:286)

“selesaikan apa yang sudah kamu mulai”. (Tuti Agustin)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamain*, dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini saya dedikasikan kepada individu-individu yang tak pernah berhenti memberikan dukungan serta curahan doa, yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kepada orang tua terkasih, Bapak Supandi dan Ibu Darnikem, yang tak pernah berhenti menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup saya. Terimakasih juga kepada keluarga saya atas cinta, dukungan, dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Fauzi, S.E., M.M. dan Ibu Irma Istiariani, S.E., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Para dosen, guru dan para pendidik yang telah menanamkan ilmu dan nilai-nilai luhur, yang menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan skripsi.

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit, dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2023)” adalah karya asli saya dan tidak mengandung materi yang telah diterbitkan sebelumnya atau pemikiran orang lain.

Semarang, 15 Februari 2025



Tuti Agustin

NIM: 2105046132

## TRANSLITERASI

Dalam konteks penulisan skripsi, transliterasi memegang peranan krusial, terutama ketika berhadapan dengan istilah-istilah yang bersumber dari bahasa Arab. Proses alih aksara ini memastikan keseragaman dan kejelasan dalam penyajian istilah, nama atau judul yang aslinya ditulis dalam aksara Arab, sebagai langkah yang tepat, sebuah kebijakan transliterasi perlu ditetapkan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Sistem penulisan Arab menunjukkan variasi dalam representasi fonem konsonan, dengan beberapa fonem yang dilambangkan oleh satu huruf, sementara yang lain membutuhkan kombinasi huruf. Hal ini perlu diperhatikan dalam transliterasi untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi. Berikut adalah daftar huruf arab dan padanan transliterasi latinnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	de (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ُ	Nun	N	en
ُ	Wau	W	we
ُ	Ha	H	ha
ُ	Hamzah	‘	apostrof
ُ	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Komposisi vokal bahasa Arab, layaknya bahasa Indonesia, mencakup monoftong (vokal tunggal) dan diftong (vokal rangkap). Karakteristik ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami esensinya dalam berbagai aspek kebahasaan.

## C. Vokal Tunggal

Representasi vokal tunggal dalam sistem penulisan Arab menggunakan harakat, yaitu tanda-tanda diakritik yang memiliki fungsi penting dalam menentukan bunyi dan makna kata, berikut adalah representasi transliterasinya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	Fathah	A	a
ُ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## D. Vokal Rangkap

Dalam bahasa Arab, vokal rangkap atau diftong adalah gabungan dari dua vokal yang iucapkan dalam satu suku kata. Diftong dalam bahasa Arab biasanya dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘ - ُ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
‘ - ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang dalam bahasa Arab, yang disebut maddah, dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf. Kombinasi ini memiliki fungsi penting dalam menentukan bunyi dan makna kata, transliterasinya yakni:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
‘ا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
ي	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَيْ ramā

### F. Ta' Marbutah

Ta' marbutah dalam transliterasi Arab-Latin memiliki dua bentuk transliterasi. Jika ta' marbutah tersebut hidup (berharakat), maka transliterasinya adalah 't'. Namun, jika ta' marbutah tersebut mati (sukun), maka transliterasinya adalah 'h'.

## ABSTRAK

Tingginya kasus korupsi di pemerintahan daerah menjadi isu penting yang memengaruhi akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal (SPI), temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi di pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur. Menggunakan data sekunder dari LHP BPK Perwakilan Jawa Timur (2021-2023), laporan tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan situs web resmi pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat korupsi, sementara transparansi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat korupsi. Temuan audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini mengakui keterbatasannya dalam memasukkan variabel lain seperti implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tambahan ini.

***Kata Kunci: SPI, Temuan Audit, Transparansi, Korupsi***

## ABSTRACT

*A quantitative methodology is utilized in this study to examine the impact of internal control systems, audit findings, and transparency on the level of corruption in district/city governments in East Java. Using secondary data from the Audit Results Report (LHP) of the East Java Representative of the Audit Board of Indonesia (BPK) for 2021-2023, annual reports of the East Java High Prosecutor's Office, and official websites of local governments, this research found that weaknesses in internal control systems have a significant positive effect on the level of corruption, while transparency has a significant negative effect on the level of corruption. Audit findings did not show a significant effect on the level of corruption. This study acknowledges its limitations in including other variables such as the implementation of good governance. Further research is suggested to consider these additional factors.*

**Keywords:** *Internal Control System, Audit Findings, Transparency, Corruption*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil’alamin*, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Temuan Audit, Sistem Penalian Internal (SPI) dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023)**”. Sholawat bersamaan dengan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita, dosen-dosen kita dan orang terdekat kita mendapat syafaat Beliau di Yaumul Mashyar kelak. *Amin ya Rabbal ‘Alamin*.

Karya tulis ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi dan sekaligus syarat menyelesaikan Sarjana Strata S1. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi, arahan dan perhatian yang diberikan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Supandi dan Ibu Darnikem, kedua orang tua yang saya cintai. Doa, inspirasi, dan dukungan yang tak pernah putus dari kalian telah menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya. Saya belajar banyak tentang arti perjuangan hidup dari kalian. Semoga doa dan dukungan kalian selalu menyertai langkah saya ke depan.
2. Keluarga besar tercinta yang senantiasa melimpahkan doa dan dukungan moril serta materil yang tak ternilai harganya dalam perjalanan pendidikan.
3. Dr. H. Muhammad Fauzi, S.E., M.M. dan Irma Istiariani, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing yang sudah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Penulis berterima kasih kepada segenap tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan landasan ilmu pengetahuan penulis selama masa studi.

5. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh individu dan instansi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, bantuan mereka sangat berarti bagi penulis.

Atas limpahan doa dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kontribusi mereka dan berharap semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda atas kebaikan mereka. Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga sebagai sarana refleksi bagi penulis.

Semarang, 13 Maret 2025



**Tuti Agustin**

**NIM: 2105046132**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI .....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	9
1.4    Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1.    Landasan Teori .....	12
2.1.1. Teori Keagenan.....	12
2.1.2. Tingkat Korupsi .....	13
<u>2.1.3. Sistem Pengendalian Internal (SPI).....</u>	15
2.1.4. Temuan Audit .....	16

2.1.5. Transparansi.....	17
2.4. Kerangka Berpikir .....	29
2.5. Pengembangan hipotesis .....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN .....	30
3.1. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2. Populasi dan Sampel.....	30
A. Populasi .....	30
B. Sampel .....	31
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	31
3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran .....	32
3.5. Teknik Analisis data.....	34
a) Statistik Deskriptif.....	34
b) Uji Asumsi Klasik .....	34
c) Analisis Regresi Linier .....	36
BAB IV .....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.2. Teknik Analisis Data .....	44
4.2.1. Statistik deskriptif .....	44
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.3. Analisis Regresi Linier .....	48
4.3. Pembahasan Penelitian .....	53
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	60
5.3. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	67

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1: Jumlah Kasus Korupsi Jawa Timur Tahun 2021-2023.....	3
Tabel 2. 1: Review Jurnal terdahulu .....	19
Tabel 3. 1: Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi .....	36
Tabel 4. 1: Jumlah Pemkab dan Pemkot Jawa Timur .....	39
Tabel 4. 2: Sampel Penelitian.....	43
Tabel 4. 3: Hasil Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 4: Hasil Uji Normalitas .....	46
Tabel 4. 5: Hasil Uji Multikolonieritas .....	47
Tabel 4. 6: Hasil Uji Glejser .....	47
Tabel 4. 7: Hasil Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4. 8: Hasil Uji Regresi Berganda .....	49
Tabel 4. 9: Hasil Uji Statistik t.....	50
Tabel 4. 10: Hasil Uji Statistik F.....	52
Tabel 4. 11: Hasil Uji Koefisien determinasi Adjusted R2.....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1: Jumlah TPK yang terjadi di Instansi Pemerintahan .....	2
Gambar 2. 1: Kerangka Berpikir .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena korupsi di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga menimbulkan persepsi bahwa praktik ini merupakan bagian integral dari budaya nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengatur tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu kerugian negara, suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Isu korupsi di Indonesia seolah tidak pernah usai. Dari tahun ke tahun, data menginformasikan kenaikan yang berdampak, baik dalam jumlah kasus, jumlah tersangka, maupun potensi kerugian negara yang menyebabkannya.

Berdasarkan survei terbaru *Transparency International* tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 121 dari 180 negara, dan skor 33 dari 100. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi<sup>1</sup>. Temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) semakin memperkuat hal ini, dengan peningkatan signifikan kasus korupsi sepanjang tahun 2023. ICW mencatat 791 kasus dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun, serta potensi kerugian lain akibat suap, gratifikasi dan pencucian uang<sup>2</sup>. Data-data ini secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensi di Indonesia, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penindakan yang lebih komprehensif dalam penanganannya.

Salah satu kasus korupsi paling banyak yaitu melibatkan unsur lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah<sup>3</sup>. Motivasi utama di balik tindakan korupsi adalah kepentingan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan serta memperoleh kekayaan. Tidak hanya melakukan penyalahgunaan wewenang untuk

---

<sup>1</sup> transparency International Indonesia, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” 2024, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.

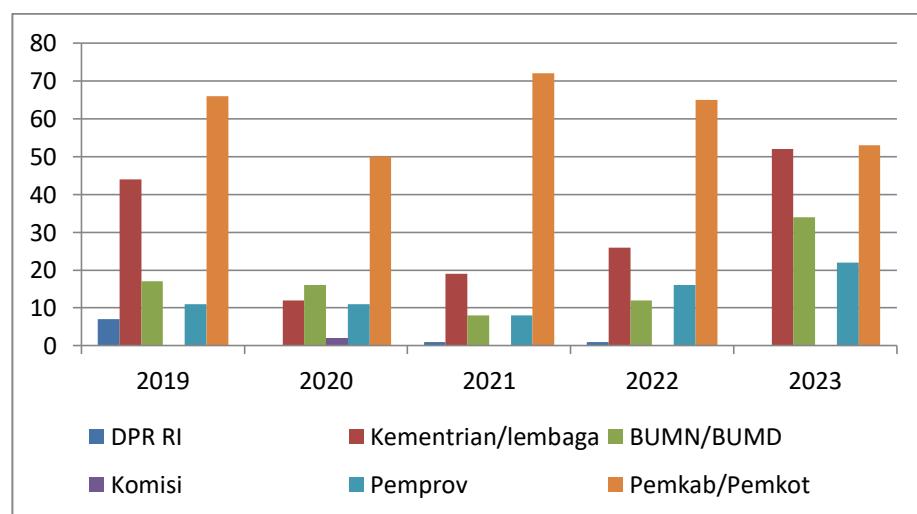
<sup>2</sup> “Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023 | ICW,” diakses 19 September 2024, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>.

<sup>3</sup> rinjani Rinjani, “Peran Auditor Internal Dan Auditor Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” 2 (2022).

keuntungan pribadi, namun tindakan-tindakan kecil yang berpotensi koruptif juga sering dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintahan terus terjadi secara berkala. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1, sebagai berikut:

**Gambar 1. 1: Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Instansi**

**Pemerintahan**



*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024(diolah)<sup>4</sup>*

Selama lima tahun terakhir, penanganan kasus korupsi di Indonesia terutama pada institusi pemerintah di tingkat daerah, yakni pemerintah kabupaten dan kota cenderung mengalami stagnasi. Jawa Timur, salah satu provinsi dengan potensi besar di Indonesia, sayangnya masih terbebani oleh masalah korupsi. Selama tiga tahun terakhir, Provinsi Jawa Timur mengalami dinamika yang signifikan dalam jumlah kasus korupsi. Berita mengenai korupsi masih santer diperbincangkan di Provinsi Jawa Timur<sup>5</sup>. Pada tahun 2023, kasus korupsi yang melibatkan Rendra Kresna,

<sup>4</sup> “TPK Berdasarkan Instansi,” diakses 24 September 2024, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.

<sup>5</sup> “Kasus Suap dan Gratifikasi DAK di Kabupaten Malang Tahun 2018,” diakses 7 November 2024, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-dan-gratifikasi-dak-di-kabupaten-malang-tahun-2018>.

dinyatakan terbukti korupsi karena menerima gratifikasi<sup>6</sup>. Terjadi kasus yang lain mengenai perkara penerimaan gratifikasi, yang melibatkan Bupati Sidoarjo yaitu Saiful Ilah kembali mencuat<sup>7</sup>. Penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Sidoarjo ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di lingkungan pemerintahan masih menjadi masalah serius. Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelapkan dana insentif yang seharusnya diterima oleh pegawai<sup>8</sup>. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1: Jumlah Kasus Korupsi Jawa Timur Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap/Gratifikasi/Pungli (Rp)
2021	42	308.860.104.402	1.433.500.000
2022	57	54.017.332.070	37.972.800.000
2023	64	172.721.277.450	16.341.792.929

*Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi (diolah)<sup>9</sup>.*

Berdasarkan data dari laporan tren penindakan kasus korupsi oleh ICW (Indonesian Corruption Watch), Provinsi Jawa Timur masih menjadi episentrum kasus korupsi di Indonesia. Selama periode tiga tahun berturut-turut, yakni 2021 hingga 2023, Provinsi Jawa Timur tidak tergantikan sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi. Meskipun dengan tingginya angka korupsi dapat mengindikasikan efektivitas penegakkan hukum, namun juga mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan diberbagai sektor pemerintahan daerah.

Korupsi merupakan masalah kompleks yang menghambat pembangunan ekonomi, demokrasi politik, dan harmoni sosial. Kolaborasi antara pelaku dalam tindakan koruptif ini menciptakan simbiosis mutualisme yang mengaburkan batas

<sup>6</sup> “Kasus Suap dan Gratifikasi DAK di Kabupaten Malang Tahun 2018.”

<sup>7</sup> Kompas Cyber Media, ‘KPK Periksa Eks Ketua DPRD Jawa Timur, Dalam Proses Turunnya Dana Hibah dari APBD’, *KOMPAS.com*, 2024 [accessed 7 November 2024].

<sup>8</sup> RUNIK SRI ASTUTI, ‘Didakwa Korupsi Insentif ASN Rp 1,4 Miliar, Bupati Sidoarjo Terancam Hukuman Seumur Hidup’, *kompas.id*, 2024 [accessed 11 November 2024].

<sup>9</sup> “Tren | ICW,” diakses 6 November 2024, <https://antikorupsi.org/category/tren>.

antara sektor publik dan swasta, serta menghambat upaya penegakan hukum<sup>10</sup>. Korupsi harus diberantas karena selain menimbulkan kerugian besar, korupsi juga merupakan tindakan yang tidak bermoral, dimana pelaku korupsi hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampaknya bagi orang lain dan masyarakat luas<sup>11</sup>. Perilaku seperti ini, dalam Al-Qur'an disebut memakan harta dengan cara yang batil. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْأَلْثِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2):188).

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah mengindikasikan bahwa desentralisasi, meskipun memberikan otonomi yang luas, belum tentu menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih<sup>12</sup>. Justru, kekuasaan yang besar ini seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga memicu praktik korupsi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan saerah di Indonesia dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai peringatan utama. Struktur kekuasaan yang tidak seimbang, ditandai oleh adanya monopoli kebijakan, menciptakan celah terjadinya penyimpangan. Individu atau kelompok yang menguasai kekuasaan tersebut cenderung merumuskan kebijakan yang menguntungkan pribadi atau kelompoknya, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi. Lemahnya mekanisme akuntabilitas dan pengawasan memperparah situasi ini,

<sup>10</sup> Rika Lidyah, “Korupsi Dan Akuntansi Forensik” 2, no. 2 (2016).

<sup>11</sup> Siti Triya Setia Ningsih, “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi,” 2022.

<sup>12</sup> Anggreni Dian Kurniawati and Yohanes Mario Pratama, ‘The Role of Government Auditing in Controlling the Level of Corruption in Indonesia’, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25.1 (2021).

sehingga korupsi menjadi fenomena yang sulit diberantas. Peningkatan akuntabilitas publik merupakan langkah krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan pemerintahan<sup>13</sup>.

Laporan keuangan merupakan sarana yang efektif bagi lembaga untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, termasuk masyarakat luas. Agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya, laporan keuangan harus di audit oleh pihak independen yaitu oleh auditor. Audit berperan sebagai mekanisme pengendalian yang krusial dalam sistem integritas nasional, berfungsi baik sebagai pencegahan maupun deteksi terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk korupsi<sup>14</sup>. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, hasilnya disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP ini memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar, serta memutar sistem pengendalian internal pemerintah daerah dan sejauh mana mereka mematuhi peraturan yang berlaku<sup>15</sup>. Salah satu indikator kuat adanya tindakan korupsi adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan audit. Temuan audit berperan sebagai dasar utama dalam penyusunan laporan audit.

Temuan-temuan ini mengidentifikasi masalah-masalah penting yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup audit, serta memiliki dampak signifikan terhadap lembaga yang diaudit<sup>16</sup>. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi tingkat korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Terdapat inkonsistensi dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi

---

<sup>13</sup> Lia Pramesti and Haryanto Haryanto, 'Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6.2 (2019).

<sup>14</sup> Baburam Bhul, 'The Role of Government Auditing for Combating Corruption and Promoting Integrity in Nepal', *Khwopa Journal*, 5.2 (2023).

<sup>15</sup> War Kini, Icuk Rangga Bawono, dan Yanuar E Restianto, "Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah," *AKUNTANSI DEWANTARA* 4, no. 2 (10 Maret 2021): 113–27,

<sup>16</sup> Khaliful Azhar, 'Pengaruh Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Korupsi Kementerian Lembaga Di Indonesia'

Christine, Rindu dan Fika<sup>17</sup>, Djoko, Djumi dan Sri Wahyuni<sup>18</sup>, serta Eva dan Yunita<sup>19</sup> menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara temuan audit terhadap tingkat korupsi. namun, penelitian lain, seperti Mauri Stela dan Haryanto<sup>20</sup>, serta Riri dan Elly<sup>21</sup> tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara temuan audit terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian, belum ada kesepakatan yang jelas atau konsisten mengenai hasil penelitian sebelumnya.

Melalui sistem pengendalian internal sebagai benteng pertahanan pertama yang bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi dengan menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. Raden Suhartono menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.<sup>22</sup> penelitian serupa oleh Aznedra, Nurhayaty dan Rizki juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap tingkat korupsi.<sup>23</sup> Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Nurfaidah dan Novita yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.<sup>24</sup> Bahkan, penelitian Aditia Inggit dan Tri Joko

---

<sup>17</sup> Christine Cinintya, Rindu Rika Gamayuni, dan Fitra Dharma, “Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia,” *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 9 (2022): 2721–35.

<sup>18</sup> Djoko Suhardjanto, Djuminah, dan Sri Wahyu Agustiningsih, “Regional Financial Performance, Audit Findings, and Corruption Levels in Indonesia” 20, no. 1 (2020).

<sup>19</sup> Eva Novita Sari Naibaho dan Yunita Kurnia Shanti, “Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Kementerian/Lembaga,” *Jurnal Akuntansi Barelang* 6, no. 1 (9 Januari 2022): 25–40, <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>.

<sup>20</sup> Mauristela Mauristela dan Haryanto Haryanto, “Efektivitas Temuan Fraud Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Opini Audit Oleh Bpk Dalam Mempengaruhi Tingkat Korupsi Pada Provinsi Di Pulau Jawa Periode Tahun 2015 - 2019,” *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 2 (26 April 2022)

<sup>21</sup> Riri Safira Syahrir dan Elly Suryani, “Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017),” *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 4, no. 1 (30 Maret 2020): 20–28.

<sup>22</sup> Raden Suhartono, “Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” *MAKSI UNTAN* 6, no. 2 (22 April 2021).

<sup>23</sup> Aznedra Aznedra, Nurhayaty Nurhayaty, dan Rizki Eka Putra, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi Kasus Skpd Kepulauan Riau),” *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi* 7, no. 1 (30 Juni 2020), <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/view/2622>.

<sup>24</sup> Nurfaidah Nurfaidah dan Novita Novita, “Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ?,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2 (12 Maret 2022): 259–69, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>.

menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi<sup>25</sup>. Hasil penelitian yang ada sejauh ini masih bersifat kontroversial dan belum mencapai kesepakatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit oleh BPK memberikan gambaran jelas tentang seberapa transparan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Harapan akan laporan keuangan yang akurat dan transparan seringkali dibandingkan dengan kenyataan maraknya kasus keadaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas dan kredibilitas informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah<sup>26</sup>. Hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi masih belum konklusif. Penelitian Salwa Nafisah dan Dedik Nur Triyanto<sup>27</sup> serta Saraswati dan Triyanto<sup>28</sup> menunjukkan hasil yang signifikan antara transparansi terhadap tingkat korupsi. Sementara penelitian Warkini, Bawono dan Restianto<sup>29</sup> serta Ningsih dan Haryanto<sup>30</sup> tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara transparansi terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya belum menunjukkan konsensus yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru pada literatur yang ada mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat korupsi pada institusi pemerintah daerah. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan, terutama di Jawa Tengah, dengan fokus pada temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit. Penelitian ini mencoba untuk memperluas cakupan analisis dengan menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan transparansi, serta

---

<sup>25</sup> Aditya Inggit Perdana dan Tri Joko Prasetyo, “Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan Apbd Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 2 (12 Juni 2023): 74–89, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266>.

<sup>26</sup> Irma Istiariani, “The Role of Religiosity and Spirituality as Efforts to Prevent Financial Reporting Fraud,” *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING* 5, no. 1 (30 Juli 2024): 17–36,

<sup>27</sup> Universitas Telkom Bandung Indonesia and others, ‘Transparency, Accountability, and Audit Findings in Bpk Ri To Minimizing the Level of Corruption’, *Research In Management and Accounting*, 2.2 (2020).

<sup>28</sup> Safira Rifka Saraswati dan Dedik Nur Triyanto, “The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption,” 2020.

<sup>29</sup> Kini, Bawono, dan Restianto, “Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah.”

<sup>30</sup> Ningsih, “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi.”

memindahkan lokasi penelitian ke Jawa Timur, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang fenomena korupsi yang dimasukkan efektif dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, sedangkan variabel transparansi yang diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana keterbukaan informasi publik dapat mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan yang lebih relevan bagi upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah dengan karakteristik serupa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul ***“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Temuan Audit dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2023)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dijelaskan mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023?
- b. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023?
- c. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023?
- d. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi secara simultan terhadap tingkat korupsi di pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2021-2023?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis temuan audit negara terhadap tingkat Korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.

- b. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap tingkat Korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.
  - c. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap tingkat Korupsi di pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.
  - d. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi di pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk meperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang akuntansi Auditing, akuntansi sektor publik khususnya terkait sistem pengendalian internal, transparansi dan temuan audit dalam tingkat korupsi.

b. Bagi Praktisi/Auditor

Harapannya penelitian ini dapat memberikan bermanfaat sebagai salah satu bahan evaluasi untuk praktisi khususnya audit terhadap sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam membuat kebijakan yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.

d. Bagi Almamater

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, sebagai sumber informasi dan referensi dalam menyelesaikan tugas akhir mereka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memberikan ide-ide baru bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang topik serupa.

e. Bagi Akademisi

Harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang audit.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang jelas dan terstruktur, berikut adalah susunan penulisan yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

**BAB I** : Bab ini akan menguraikan komponen-komponen penting dalam pendahuluan penelitian, memuat uraian mengenai landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah penelitian yang akan dijawab, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penyusuan skripsi ini.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini menyajikan pemaparan konseptualisasi mengenai sistem pengendalian internal, temuan audit, transparansi dan tingkat korupsi. Selain itu, bab ini juga menyajikan landasan teori yang mendukung penelitian ini, serta merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan pengamatan tersebut, kerangka berpikir penelitian dan hipotesis penelitian kemudian dirumuskan.

**BAB III** : Bab ini akan membahas secara rinci metodologi penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan sumber data yang

dianalisis, metode pengumpulan data yang diterapkan, penentuan populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan, definisi operasional variabel penelitian, serta metode analisis data yang diaplikasikan.

**BAB IV** : Bab ini berfokus pada penyajian data hasil penelitian dan pembahasan analitisnya, meliputi deskripsi karakteristik data dan konteks penelitian, serta analisis data kuantitatif yang telah dilakukan. Proses analisis meliputi pengujian validitas dan reabilitas instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis penelitian. Hasil analisis akan dibahas secara mendalam dan dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

**BAB V** : Penutup. Bab ini mengakhiri penulisan skripsi dengan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis ata. Kesimpulan yang disajikan mencakup implikasi dari temuan penelitian terhadap tingkat korupsi. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori agensi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, yaitu ketika prinsipal melimpahkan kekuasaan kepada agen untuk bertindak atas nama dan kepentingannya. Prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk mencapai tujuan bersama, namun potensi konflik kepentingan selalu ada<sup>31</sup>. Konflik kepentingan yang inheren dalam hubungan ini, yang seringkali muncul akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan, dapat menghambat optimalisasi nilai perusahaan<sup>32</sup>. Mengacu pada teori keagenan Jensen dan Meckling, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat didefinisikan sebagai hubungan keagenan<sup>33</sup>. Masalah keagenan dalam konteks ini muncul akibat perbedaan asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat secara tidak langsung kepada pemerintah daerah berperan sebagai prinsipal. Prinsipal ini mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsipal meskipun memiliki akses terhadap informasi, seringkali terbatas dalam memperoleh informasi internal yang bersifat operasional. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan prinsipal dalam melakukan pengawasan yang

---

<sup>31</sup> Yolinda Yanti Sonbay, “Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti,” *Ekuitas (jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 6, no. 2 (30 Juni 2022): 204–23, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>.

<sup>32</sup> Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi” 2, no. 1 (2007).

<sup>33</sup> Michael C. Jensen dan William H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1 Oktober 1976): 305–60, [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).

efektif terhadap kinerja agen dan membuat keputusan investasi yang tepat<sup>34</sup>. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, serta asimetri informasi yang signifikan, menciptakan potensi terjadinya konflik kepentingan yang dapat memicu tindakan koruptif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat dan mekanisme akuntansi yang transparan untuk memastikan akuntabilitas manajer dan melindungi kepentingan pemilik<sup>35</sup>.

Eisenhardt mengemukakan tiga asumsi dasar manusia dalam teori keagenan: egoisme individu (*self interest*), keterbatasan kognitif dalam memprediksi masa depan (*bounded rationality*), dan aversi terhadap risiko (*risk averse*)<sup>36</sup>. Oleh karena itu, dalam merancang kontrak, pertimbangan terhadap perilaku spesifik agen yang didorong oleh ketiga asumsi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati.

### 2.1.2. Tingkat Korupsi

Kompleksitas korupsi sebagai suatu tindak pidana yang terletak pada keterlibatan pihak lain di dalamnya, seperti dalam praktik suap dan korupsi yang terorganisir, sehingga menyulitkan proses deteksi. Akan tetapi jika dikaji lebih dalam, situasi ini terjadi karena adanya kolusi yang merugikan, yang didalamnya termasuk otoritas/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan hadiah yang tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*)<sup>37</sup>. Kondisi utama yang memungkinkan terjadinya korupsi adalah pertama, adanya individu yang memiliki kekuasaan, terutama dalam hal pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Kedua, terdapat *economic rents*, yaitu keuntungan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari kebijakan publik

---

<sup>34</sup> Hilda Salman Said dkk., “Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah,” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 5 (25 Desember 2022): 2434–39, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>.

<sup>35</sup> M Rizal Satria, “Peran Teori Agensi Dalam Issue Bidang Akuntansi” 3 (2022).

<sup>36</sup> Kathleen M. Eisenhardt, “Agency Theory: An Assessment and Review,” *Academy of Management Review*, 1 Januari 1989, <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>.

<sup>37</sup> Ika ristianingsih’ “telaah konsep fraud diamond theory dalam mendeteksi perilaku fraud di perguruan tinggi”, prosiding seminar nasional dan call for paper ekonomi dan bisnis, 2017.

tersebut. Ketiga, sistem yang ada memberikan celah atau peluang bagi pejabat publik untuk melakukan pelanggaran<sup>38</sup>.

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan tindakan yang dilarang dan dianggap sebagai dosa karena mencuri hak orang lain, serupa dengan perbuatan pencurian. Hukum Islam dengan tegas mengharamkan korupsi karena dampaknya yang merugikan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan larangan keras terhadap praktik korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunan Ibnu Majah dalam kitab hukum-hukum no. 2304<sup>39</sup> tentang teguran untuk berlaku zhalim dan korup:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاسِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap".

Korupsi tingkat tinggi (*hypercorruption*) memiliki dampak yang sangat merugikan. Fenomena ini seringkali ditemukan dalam pemerintahan daerah di berbagai negara<sup>40</sup>. Korupsi sistematis tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat distorsi insentif, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga pemerintahan dan memperparah kesenjangan sosial<sup>41</sup>. Ketika korupsi sudah demikian mengakar, sehingga hak milik tidak lagi terjamin, hukum tidak lagi

<sup>38</sup> Wijayanto, 'Korupsi mengorupsi Indonesia'

<sup>39</sup> "Hadits Majah No. 2304 | Terguran untuk berlaku zhalim dan korup," Hadits.id, diakses 3 Februari 2025, <http://www.hadits.id/hadits/majah/2304>.

<sup>40</sup> Robert E. Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention* (Oakland, Calif.: Ics Pr, 2000).

<sup>41</sup> Fathur Rahman, "Korupsi Di Tingkat Desa" Vol.2, No.1 (2011).

ditegakkan, dan iklim investasi menjadi tidak konusif, maka pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami stagnasi.

### 2.1.3. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kerangka kerja yang diterapkan pada seluruh lembaga pemerintahan, baik pusat maupun, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara<sup>42</sup>. Pengawasan internal mencakup berbagai kegiatan mulai dari audit hingga pemantauan untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi organisasi dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.<sup>43</sup> SPI berperan sebagai alat pengawasan dan akuntabilitas dalam suatu organisasi. Dalam perspektif Islam, konsep hisbah (pengawasan) menekankan pentingnya sistem pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sebagaimana dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ مَا تَعْمَلُونَ  
وَلَا تَنْهَرُ نَفْسًا مَا قَدَّمَتْ وَلَا تَقُولُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)<sup>44</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap individu harus senantiasa mengevaluasi perbuatannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aministrasi, agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu sistem yang

<sup>42</sup> Raden Suhartono, “Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” *MAKSI UNTAN* 6, no. 2 (22 April 2021).

<sup>43</sup> Kini, Bawono, dan Restianto, “Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah.”

<sup>44</sup> Kemenag, “Terjemah Qur'an,” 2019.

dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas organisasi. Tujuannya adalah memastikan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 telah mengatur standar yang harus dipenuhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Dengan demikian efektivitas sistem tersebut dan menjadi dasar dalam memberikan penilaian (opini) atas kinerja pemerintah<sup>45</sup>.

#### 2.1.4. Temuan Audit

Selain memberikan opini audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyajikan temuan-temuan materi yang diperoleh selama proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pelaporan keuangan entitas tersebut<sup>46</sup>. Temuan audit merupakan kumpulan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diuji secara cermat selama proses audit. Informasi ini kemudian disusun dan dijelaskan secara detail sesuai dengan pentingnya komponen-komponen. Temuan audit menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Islam melarang tindakan yang merugikan orang lain, termasuk aspek keuangan dan administrasi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحَكَمِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ  
وَآتُوهُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim

<sup>45</sup> RM Syah Arief Atmaja W dan Agung N P, “Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 1, no. 1 (2015): 81–110.

<sup>46</sup> Tania Angela, Marsellisa Nindito, dan Hera Khairunnisa, “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi,” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 4, no. 2 (25 Desember 2023): 506–25, <https://doi.org/10.21009/japa.0402.11>.

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>47</sup>

Ayat ini menegaskan larangan terhadap tindakan penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, sebagaimana yang sering ditemukan dalam laporan audit. Temuan audit merupakan hasil dari perbandingan antara kondisi aktual dan kondisi yang seharusnya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan dari standar ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal<sup>48</sup>. Oleh karena itu, fungsi pengawasan internal sangat krusial dalam mengidentifikasi dan melaporkan temuan audit tersebut, yang menuntut kemampuan analitis tajam dan pemahaman yang mendalam terhadap standar yang berlaku.

### **2.1.5. Transparansi**

Menurut peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi keuangan merupakan proses penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan akuntabel kepada publik, dengan tujuan memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh akses atas informasi mengenai pengelolaan keuangan negara serta memastikan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang berlaku<sup>49</sup>. Transparansi, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Prinsip ini menekankan pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh publik.

Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan merupakan prinsip penting dalam islam, karena berkaitan dengan amanah dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

---

<sup>47</sup> Kemenag, “Terjemah Qur'an.”

<sup>48</sup> Robby Sugiarto dan Gunawan Santoso, “Peran Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Audit Delay” 1, no. 2 (2012).

<sup>49</sup> Staf Sesneg, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,” t.t.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْأَمْنِتِ إِلَى أَهْلِهَا لَوْا حَكْمَتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصَرِيرًا ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Prinsip transparansi ini menuntut keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik, sehingga dapat meminimalisir tindakan korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Transparansi merupakan suatu tindakan proaktif dalam memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan objektif kepada publik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tujuan utama dari transparansi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga, dan mendorong tata kelola yang baik melalui penyediaan informasi yang lengkap dan terbuka<sup>50</sup>. Transparansi dapat diukur melalui sejauh mana informasi laporan keuangan dapat diakses oleh publik. Beberapa pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat, telah menyediakan laporan keuangan mereka di situs web resmi mereka, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memahami infomasi tersebut.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji tingkat korupsi berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari jurnal nasional maupun internasional, yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa diantaranya:

---

<sup>50</sup> Zefri Maulana dan Nasrul Kahfi Lubis, “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 4, no. 1 (11 Oktober 2020): 1–14, <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2660>.

**Tabel 2. 1: Review Jurnal terdahulu**

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependent	Teori (jika ada)	Alat analisis	Hasil
1	Anggreni Dian Kurniawati, Yohanes Mario Pratama (2021)	<i>Peran audit pemerintah dalam mengontrol level kasus korupsi di Indonesia</i>	Penyimpangan atau penyalahgunaan X1, Opini Audit X2, pembetulan audit X3	Y Tingkat Korupsi	-	Regresi berganda	X1 berpengaruh positif terhadap Y sebesar 3,127 (diterima) X2 tidak berpengaruh terhadap Y sebesar 0,552 (ditolak) X3 berpengaruh positif terhadap Y sebesar 3,594 (ditolak) X1, X2 dan X3 berpengaruh simultan dengan $R^2$ 0,413
2	Indah Permata Sari, Andi Manggala Putra, Sumilir (2021)	<i>Apakah opini audit penting dalam Manajemen skandal korupsi dan hukum?</i>	Ukuran KAP (X1), Pergantian Auditor (X2), Audit tenure (X3), Audit fee (X4)	Manajemen Skandal Korupsi	-	Regresi logistik	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X2 berpengaruh signifikan terhadap

							Y X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X4 berpengaruh signifikan terhadap Y
3	Christine Cinintya, Rindu Rika Gamaya ni, Fitra Dharma (2022)	<i>Transparasi hasil audit laporan keuangan dan korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia</i>	Transparasi X1, Temuan Audit X2, TLRHP X3	Tingkat Korupsi	Teori Keagungan, Teori Sinyal	Regresi linier berganda	X1 berpengaruh negatif terhadap Y sebesar -1,902 (diterima) X2 berpengaruh positif terhadap Y sebesar 0,124 (ditolak) X3 tidak berpengaruh terhadap Y X1, X2, dan X3 berpengaruh simultan dengan <i>R-squared</i> 0,748780
4	Siti Fatimah, Muaidy Yasin, Abdul Manan,E	<i>Analisis variabel determinan tingkat korupsi</i>	Desentralisasi fiskal (X1), Tingkat Ekonomi (X2) Rasio Transfer	Tingkat Korupsi	Teori vroom	Regresi	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y

	mi Salmah, dan Siti Sriningsih (2023)	<i>di Indonesia</i>	(X3) Opini Audit (X4)				X2 berpengaruh signifikan terhadap Y X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y
5	Jin liu a, y Bin Lin a, b (2012)	<i>Govern ment auditing and corrupti on control: Evidence from China's provinci al panel data</i>	Penyimpangan (X1), Pembetulan audit pemerintah, lembaga audit lokal (X2)	Tingkat Korupsi	-	Regresi	X1 berhubungan positif terhadap Y X2 semakin efektif dalam mengurangi Y
6	Houqe, Muhammad Nurul, Monem, Reza M (2016)	<i>Adopsi IFRS, tingkat pengung kapan, dan persepsi korupsi: Studi Lintas Negara</i>	Pengalaman IFRS yang lebih lama (X1), luas pengungkapan (X2)	Persepsi kurangnya Korupsi	-	Statistik Deskriptif	X1 berpengaruh positif terhadap Y X2 berpengaruh positif terhadap Y
7	Salwa Nafisah, Dedik Nur	<i>Transpa rency, Account ability,</i>	Transparancy (X1), Akuntabilitas (X2), dan	Tingkat korupsi	-	Regresi linier berganda	X1 berpengaruh signifikan

	Triyanto (2019)	<i>and audit findings in BPK RI to minimizing the level of corruption</i>	temuan pemeriksaan BPK-RI (X3).				terhadap Y X2 berpengaruh signifikan terhadap Y sebesar X3 berpengaruh signifikan terhadap Y
8	Olaoye, Azeez Ayoola, Olaoye, F. Oladipupo (2021)	<i>Lifestyle Audit and Fighting Against Corruption: Evidence from Nigeria</i>	Analisis Laba bersih dan lifestyle audit (X1), Analisis deposito bank (X2).	Pemberantasan korupsi	Teori PTC	Regresi berganda	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y (ditolak) X2 berpengaruh signifikan terhadap Y (diterima)
9	Supriadi Laupe, Muhammad Ikbal, Abdul Kahar, Fadli Moh. Saleh, Femilia Zahra, Nur Avni Syamsuddin	<i>Skepticism auditor, akuntansi forensik, audit investigasi dan pengungkapan kecurangan kasus korupsi</i>	Akuntansi forensik (X1), Audit investigasi (X2), Skepticism auditor dapat memperkuat pengaruh akuntansi forensik (X3), Skeptisisme auditor dapat memperkuat pengaruh audit investigatif (X4).	Pengungkapan penipuan kasus korupsi	Teori agensi dan akuntansi forensik	PLS	X1 berpengaruh terhadap Y (diterima) X2 berpengaruh terhadap Y X3 dapat memperkuat pengaruh terhadap y (diterima) X4 dapat memperkuat pengaruh terhadap y (diterima)

							uat pengaruh terhadap Y (diterima)
10	Muhammad Agung Budiman, Firdaus Amyar (2021)	<i>Pengaruh opini audit, implementasi dari audit rekomendasi, dan temuan kerugian negara tingkat korupsi di kementerian dan lembaga di negara Republik Indonesia</i>	Opini wajar tanpa pengecualian (X1), Pelaksanaan rekomendasi audit (X2), Temuan kerugian negara (X3).	Kasus korupsi di kementerian dan lembaga RI	Teori agensi dan Teori kesenjangan harapan	Statistik deskriptif	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X3 berpengaruh positif terhadap Y
11	Siti Triya Setia Ningsih, Haryanto (2022)	<i>Pengaruh temuan audit, opini audit dan transparansi terhadap tingkat korupsi</i>	Temuan audit (X1), Opini audit (X2), Transparansi (X3)	Tingkat korupsi	Teori keagungan dan Teori asimetri informasi	Statistik deskriptif	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y sebesar $0,203 > 0,05$ (ditolak) X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y sebesar $0,073$ X3 tidak berpengaruh

							uh signifikan terhadap Y
12	Djoko Suhardjanto, Djumina h, Sri Wahyu Ningsih (2020)	<i>Kinerja Keuangan Daerah, Temuan Pemeriksaan, dan Tingkat Korupsi Pada Indonesia</i>	Tingkat temuan audit dengan tingkat independensi (X1), Tingkat temuan audit dengan tingkat belanja operasional (X2), Tingkat temuan audit dengan tingkat belanja modal (X3)	Tingkat Korupsi	Teori klitgar d	Regresi Moderat (MRA)	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y (ditolak) X2 berpengaruh signifikan terhadap Y (diterima) X3 berpengaruh signifikan terhadap Y (diterima)
13	Tania Angela, Marsellisa Nindito, dan hera Khairunnisa (2023)	<i>Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi</i>	Temuan audit (X1), Opini Audit (X2), dan Tindak Lanjut Hasil Audit (X3)	Tingkat Korupsi	-	Regresi	X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X3 berpengaruh signifikan terhadap Y
14	Ku He, Xiaofei Pan,	<i>Koneksi politik, Opini</i>	Perusahaan non-Menerima	Tahun terjadinya dan paska	Teori keagenan	Logit (ordered logit)	X1a berpengaruh

	Gary Tian	<i>Audit, dan pilihan Auditor: bukti dari kasus korupsi</i>	banyak kerugian opini audit (X1a), Menerima opini audit yang disukai (X1b), non-BUMN secara politik cenderung memilih auditor non-lokal (X2a), BUMN secara politik cenderung memilih auditor kecil/lokal (X2b)	Kasus korupsi			signifikan terhadap Y X1b berpengaruh signifikan terhadap Y X2a berpengaruh signifikan terhadap Y X2b berpengaruh signifikan terhadap Y
15	Maurista la dan Haryanto (2022)	Aktifitas temuan fraud audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan opini audit oleh BPK dalam memperbaiki tingkat korupsi provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-	Temuan Audit (X1), Tindak lanjut hasil pemeriksaan (X2), dan Opini Audit (X3)	Tingkat korupsi	Teori agency	Regressi linier berganda	X1 tidak berpengaruh terhadap Y X2 berpengaruh negatif terhadap Y X3 berpengaruh negatif terhadap Y.

		2019					
--	--	------	--	--	--	--	--

### 2.3. Rumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan pemahaman bahwa kebenarannya masih tentatif dan memerlukan verifikasi empiris<sup>51</sup>. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja konsep yang memandu penelitian, dengan memberikan arah yang jelas dalam pengumpulan dan analisis data, serta memungkinkan peneliti untuk menguji teori-teori yang ada<sup>52</sup>.

#### A. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat Korupsi.

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sering ditemukan mengindikasikan adanya potensi yang diotorisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif akibat kurang cermatnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya<sup>53</sup>. Hubungan keagenan, yang menjadi fokus teori keagenan, secara intrinsik terkait dengan tingginya otoritas yang diberikan kepada pihak yang bertindak sebagai perwakilan. Konflik kepentingan dalam teori keagenan muncul karena pemerintah sebagai agen, yang memiliki banyak wewenang, mungkin tidak selalu bertindak demi kepentingan masyarakat sebagai prinsipal.

Sistem pengendalian internal memberikan penyelesaian bagaimana konflik kepentingan tersebut dapat diatasi. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan hal ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan implementasi program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di

---

<sup>51</sup> M. Zaki dan Saiman Saiman, “Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (16 Maret 2021): 115–18.

<sup>52</sup> *Metodologi penelitian*, diakses 13 Oktober 2024.,

<sup>53</sup> Nurfaidah dan Novita, “Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ?”

pemerintah daerah<sup>54</sup>. Hal serupa juga dalam penelitian Aznedra, Nurhayaty dan Rizki bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat korupsi<sup>55</sup>. Berdasarkan uraian tersebut peulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

## **H1 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi**

### **B. Pengaruh Temuan Audit terhadap tingkat korupsi.**

Temuan audit dapat mengindikasikan kesesuaian dan ketidak sesuaian. Temuan Audit dapat mengarah pada identifikasi risiko, identifikasi *opportunities for improvement* (peluang peningkatan) atau pencatatan *good practices*. Temuan audit merupakan informasi yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP atau BPK. Informasi ini mencakup temuan-temuan signifikan, baik yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal maupun pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku<sup>56</sup>. Hal tersebut didasarkan untuk meminimalisir tindakan korupsi yang terjadi sebuah entitas atau pemerintah daerah.

Berdasarkan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, temuan audit yang diungkapkan secara transparan kepada publik dapat mengurangi risiko kecurangan dan akuntabilitas pemerintah. Peluang kemungkinan fraud biasanya disebabkan karena tidak adanya pengawasan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christine, Rindu dan Fika dalam hasil penelitiannya temuan audit berpengaruh positif dalam mengurangi risiko korupsi. Hasil tersebut didukung oleh penelitian lain terkait temuan audit oleh Djoko dan Sri bahwa Temuan audit pembelanjaan operasional dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kasus korupsi.<sup>57</sup> Selanjutnya, menurut penelitian Liu dan Lin, temuan audit secara

---

<sup>54</sup> Suhartono, “Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.”

<sup>55</sup> Aznedra, Nurhayaty, dan Putra, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi Kasus Skpd Kepulauan Riau).”

<sup>56</sup> Salwah dan Tituk, ‘Pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah’, jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi, vol:13 No:2, 2022.

<sup>57</sup> Djoko dan Sri, ‘Kinerja Keuangan Daerah, Temuan Pemeriksaan, dan Tingkat Korupsi Pada Indonesia’, 2020.

signifikan mempengaruhi tingkat korupsi<sup>58</sup>. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2: Temuan Audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.**

**C. Pengaruh Transparansi terhadap tingkat korupsi.**

Transparansi dan audit merupakan suatu mekanisme penting yang dapat diimplementasikan untuk mencegah dan mengurangi korupsi dalam pengelolaan pemerintahan. Adanya transparansi dan audit yang baik, potensi terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Brusca dkk berargumen bahwa transparansi memiliki potensi untuk menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Transparansi berkaitan dengan tingkat keterbukaan atau kejelasan informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin mudah bagi pihak lain untuk memahami dan mengakses informasi yang relevan<sup>59</sup>.

Berdasarkan Teori Keagenan transparansi mendukung dalam mengurangi terjadinya asimetri informasi, hal ini merupakan persepsi masyarakat tentang ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh pihak prinsipal dan agen (pemerintah daerah). Ketika informasi keuangan atau kebijakan organisasi diungkap secara jelas, publik mungkin lebih percaya dan merasa lebih aman secara finansial. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Salwa dan Dedik transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>60</sup>. Penelitian ini juga didukung oleh Saraswati dan Triyanto bahwa transparansi berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap tingkat korupsi<sup>61</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.**

---

<sup>58</sup> Jin Liu dan Bin Lin, "Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data," *China Journal of Accounting Research* 5, no. 2 (Juni 2012): 163–86, <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>.

<sup>59</sup> Nafisah, Triyanto, dan Universitas Telkom Bandung Indonesia, "Transparency, Accountability, and Audit Findings in Bpk Ri to Minimizing the Level of Corruption."

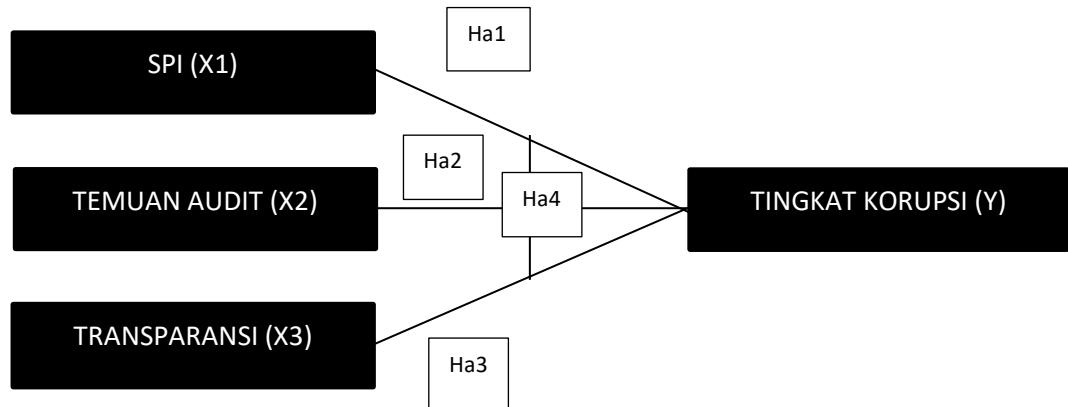
<sup>60</sup> Nafisah, Triyanto, dan Universitas Telkom Bandung Indonesia.

<sup>61</sup> Saraswati dan Triyanto, "The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption."

## 2.4. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan rumusan hipotesis yang telah dikemukakan, kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. 1: Kerangka Berpikir**



## 2.5. Pengembangan hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 :  $\beta_1 = 0$  terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi

$H_01 : \beta_1 \neq 0$  tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi

Ha2 :  $\beta_2 = 0$  terdapat pengaruh antara temuan audit terhadap tingkat korupsi

$H_02 : \beta_2 \neq 0$  tidak terdapat pengaruh antara temuan audit terhadap tingkat korupsi

Ha3 :  $\beta_3 = 0$  terdapat pengaruh antara transparansi terhadap tingkat korupsi

$H_03 : \beta_3 \neq 0$  tidak terdapat pengaruh antara transparansi terhadap tingkat korupsi

Ha4 :  $\beta_4 = 0$  terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi secara simultan terhadap tingkat korupsi

$H_04 : \beta_4 \neq 0$  tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi secara simultan terhadap tingkat korupsi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini betujuan untuk menguji teori atau hipotesis sementara dengan menggunakan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka-angka, serta untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi<sup>62</sup>. Penelitian ini fokus pada pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Jawa Timur dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data mengenai tindak pidana korupsi dihimpun dari Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sedangkan data terkait sistem pengenalian internal dan temuan audit diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah (LHP LKPD) yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur dalam rentang waktu tahun 2021-2023. Sementara itu, data terkait transparansi dikumpulkan dari situs web resmi masing-masing instansi.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

##### **A. Populasi**

Populasi penelitian adalah keseluruhan kelompok subjek atau individu yang memiliki kriteria inklusi yang telah ditentukan oleh peneliti, yang menjadi fokus pengamatan dalam konteks wilayah dan waktu yang spesifik<sup>63</sup>. Penelitian ini mengambil populasi dari seluruh entitas pemerintahan daerah di Jawa Timur, dengan rincian 9 pemerintah kota dan 29 pemerintah kabupaten. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data dan informasi yang tersedia, tingkat korupsi di wilayah ini masih tergolong tinggi.

---

<sup>62</sup> Samarnu, dasar metodologi Penelitian Kuantitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2017),2.

<sup>63</sup> Supardi, ‘Populasi dan Sampel’

## B. Sampel

Sampel adalah kelompok individu, objek, atau kejadian yang dipilih dari populasi yang lebih besar untuk dijadikan subjek penelitian<sup>64</sup>. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang terpilih representatif terhadap populasi. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Sapardi, pengambilan sampel dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*. Untuk penelitian ini, digunakan metode non-probability sampling dengan penerapan teknik purposive sampling dan kriteria seleksi sampel sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kota dan Kabupaten yang di audit oleh BPK Jawa Timur dan tercatat dalam IHPD.
3. Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menyajikan data untuk seluruh variabel bebas pada tahun 2021-2023.

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada lembaga pemerintah tingkat kota dan kabupaten di Jawa Timur yang memenuhi kriteria tertentu. Data yang dikumpulkan selama periode 2021-2023 dari 38 instansi menghasilkan 114 sampel data untuk dianalisis.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data sekunder merujuk pada data yang telah dikompilasi dan dijelaskan oleh pihak lain sebelum dilakukannya penelitian ini. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti publikasi ilmiah, dokumen resmi, atau hasil penelitian terdahulu<sup>65</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>64</sup> Mary Hibberts, R. Burke Johnson, dan Kenneth Hudson, “Common Survey Sampling Techniques,” dalam *Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences*, ed. oleh Lior Gideon (New York, NY: Springer New York, 2012), 53–74, [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3876-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3876-2_5).

<sup>65</sup> Rizal Hans, “Data Sekunder : Metode Analisis, Serta Kelebihan Kekurangannya,” diakses 24 Oktober 2024, <https://dqlab.id/data-sekunder-metode-analisis-serta-kelebihan-kekurangannya>.

diperoleh dari Website setiap pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur, Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK Jawa Timur. Penggunaan data sekunder memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, serta ketersediaan data yang komprehensif.

### **3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran**

Tujuan penelitian ini untuk memahami hubungan antara sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi terhadap tingkat korupsi. Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi merupakan variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat korupsi. Adapun untuk operasional variabel penelitian dan pengukurannya ditunjukkan sebagai berikut:

#### a. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mencegah kesalahan, izin dan kerugian. SPI juga membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien<sup>66</sup>. Kelemahan dalam SPI dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi dan merusak reputasi organisasi. Penelitian ini menggunakan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal yang dilaporkan BPK Jawa Timur dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LHPD) sebagai indikator untuk mengukur efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah<sup>67</sup>.

Sistem Pengendalian Internal = Jumlah Temuan Kelemahan SPI

---

<sup>66</sup> Mattoasi Mattoasi, Didiet Pratama Musue, dan Yaman Rauf, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,” *Jambura Accounting Review* 2, no. 2 (21 Agustus 2021): 100–109, <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>.

<sup>67</sup> Budi S. Purnomo, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1 (27 April 2014): 276–88, <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>.

### b. Temuan Audit

Temuan audit yang mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan adanya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku<sup>68</sup>. Sebagai sumber data temuan audit, penelitian ini memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur. Secara spesifik, data yang digunakan meliputi jumlah temuan atas pelanggaran peraturan-undangan pada periode sebelumnya, yang menyebabkan kerugian negara baik secara aktual maupun potensial, serta mengurangi pendapatan negara<sup>69</sup>. Apabila data tersebut tidak tersedia dalam laporan IHPD, maka entitas yang bersangkutan tidak akan dimasukkan ke dalam sampel penelitian.

Temuan Audit = Total Temuan Ketidakpatuhan perundang-undangan<sup>70</sup>.

### c. Transparansi

Transparansi adalah kunci keberhasilan suatu pemerintahan. Empat indikator kunci untuk mengukur tingkat transparansi suatu organisasi adalah:

1. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan anggaran.
2. Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses
3. Pengungkapan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu
4. Tingkat tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat<sup>71</sup>.

Pengukuran transparansi pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan skala penilaian 1 hingga 4. Skor tertinggi (4) diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi seluruh indikator transparansi, sedangkan

---

<sup>68</sup> Rafrini Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, dan Shinta Budi, “Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)[Audit Finding And Audit Rectification On Audit Opinion (Case Study-Provincials Government Of Republic Indonesia)],” *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)* 1, no. 1 (2020): 14–27.

<sup>69</sup> Amyulianthy, Anto, dan Budi.

<sup>70</sup> Ningsih, “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi.”

<sup>71</sup> ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera) [accessed 13 October 2024].

- skor terendah (1) diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak memenuhi satupun indikator.
- d. Tingkat Korupsi

Untuk mengukur variabel tingkat korupsi, indikator yang umum digunakan dalam penelitian terkait yaitu jumlah tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, diukur melalui jumlah kasus yang melibatkan pemerintahan kabupaten dan kota pada tahap penyidikan, penuntutan, eksekusi perorangan/badan atau keduanya<sup>72</sup>.

### **3.5. Teknik Analisis data**

#### **a) Statistik Deskriptif**

Statistik adalah sekumpulan sekumpulan angka yang menerangkan sesuatu, baik angka yang sudah tersusun dalam suatu label. Statistik deskriptif berperan dalam proses pengumpulan dan penyajian data dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman informasi yang terkandung didalamnya. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu fenomena sosial yang menjadi objek penelitian<sup>73</sup>. Selain itu, dalam analisis deskriptif juga memungkinkan untuk mengkategorikan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap variabel ke dalam tingkatan rendah, sedang, atau tinggi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik variabel-variabel yang diteliti.

#### **b) Uji Asumsi Klasik**

##### **a) Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa variabel independen dan variabel dependen terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan untuk memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linier. Jika data tidak berdistribusi normal, hasil analisis regresi yang

---

<sup>72</sup> Naibaho dan Shanti, “Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Kementerian/Lembaga.”

<sup>73</sup> Anastasia suci Sukmawati dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

diperoleh bisa jadi tidak valid atau tidak dapat diandalkan<sup>74</sup>. Salah satu asumsi penting dalam analisis regresi adalah bahwa residual dari model regresi harus berdistribusi normal. Normalitas data dapat diuji melalui beberapa metode, termasuk menggunakan grafik *Observed Cum Probability* atau *Normal Probability Plot*. Grafik ini memplot nilai observasi kumulatif terhadap nilai probabilitas kumulatif dari distribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi, perlu dilakukan uji multikoliniearitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebas. Jika terjadi multikolinieritas yang tinggi, maka sulit untuk mengidentifikasi secara pasti pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel ujungnya, kesimpulan yang diperoleh dari analisis regresi menjadi kurang reliabel<sup>75</sup>.

c) Uji Heteroskedastisitas

Dalam analisis regresi linier, salah satu asumsi penting adalah homoskedastisitas, yaitu varian residual (error) harus konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah asumsi ini terpenuhi atau tidak. Jika terdeteksi heteroskedastisitas, maka varian residual tidak konstan, yang berarti bahwa model regresi linear yang digunakan mungkin tidak valid dan perlu dilakukan koreksi<sup>76</sup>.

d) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dan t-1 dalam model regresi linear. Hal ini penting karena autokorelasi dapat menimbulkan

---

<sup>74</sup> Akbar Nasrum, "Uji Normalitas Data Untuk Penelitian," *Jayapangus Press Books*, 28 Februari 2018, i–117.

<sup>75</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, "Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS," t.t.

<sup>76</sup> Sahid Raharjo, "Uji Heteroskedastisitas Glejser dengan SPSS Sangat Lengkap," *Dipetik 3*, no. 10 (2014): 2020.

masalah pada model regresi, sehingga menghasilkan hasil yang tidak akurat. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan memiliki keterkaitan, mengakibatkan *error term* menjadi tidak independen antar observasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk menguji autokorelasi, antara lain Uji Durbin-Watson, Uji Lagrange Multiplier, Run test, Uji Ljung-Box, Uji Box-Pierce. Penelitian ini memilih Uji Durbin-Watson sebagai metode yang digunakan. Pengambilan keputusan sesuai didasarkan pada tabel berikut<sup>77</sup>:

**Tabel 3. 1: Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Imam Ghazali 2013

### c) Analisis Regresi Linier

Analisis regresi, yang berakar pada studi Galton tentang regresi menuju rata-rata, memungkinkan peneliti untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan satu atau lebih variabel independen. Tujuan utama analisis ini adalah untuk mengestimasi parameter model dan menguji signifikansi hubungan antara variabel-variabel tersebut<sup>78</sup>. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan analisis regresi.

#### a) Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah metode statistik yang diterapkan untuk menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel independen (X) terhadap

<sup>77</sup> Imam Ghazali, “Aplikasi analisis multivariete SPSS 25” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11086144504379246298&hl=en&oi=scholarr>.

<sup>78</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Gramedia Pustaka Utama, 2013).

satu variabel dependen (Y)<sup>79</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intenal, Temuan Audit, dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi. Analisis regresi linier berganda dipilih sebagai metode analisis karena memungkinkan untuk mengukur secara simultan pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Korupsi. Model regresi linier berganda menganalisis hubungan antara suatu variabel terikat (Y) dengan sejumlah variabel bebas (X). Variabel-variabel independen ini tidak hanya berjumlah lebih dari satu, tetapi juga harus memiliki keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen<sup>80</sup>. Rumusnya adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Ket:

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

$e$  = *error estimated*

Y = Tingkat Korupsi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Temuan Audit

X3 = Transparansi

b) Uji Statistik t

Uji t diterapkan untuk mengverifikasi hipotesis penelitian yang menyatakan keberadaan pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian ini memperhitungkan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang telah ditemukan (biasanya 5%). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi kurang dari 0,05,

---

<sup>79</sup> Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)* (GUEPEDIA, 2021).

<sup>80</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2013), 54.

maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan<sup>81</sup>.

c) Uji Statistik F

Uji Statistik F, juga dikenal sebagai uji ANOVA (*Analysis of Variance*), adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antara mean dari dua kelompok atau lebih. Dalam konteks regresi, Uji F bertujuan untuk menentukan apakah gabungan variabel independen secara signifikan mempengaruhi variasi dalam variabel dependen. Pengujian ini melibatkan perbandingan antara variabilitas yang dapat dijelaskan oleh model regresi dengan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan. Penentuan signifikansi uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung yang diperoleh dengan nilai F tabel yang telah ditentukan atau dengan melihat nilai signifikansi F yang biasanya ditetapkan sebesar 5%<sup>82</sup>.

d) Uji Koefisien determinasi *Adjusted R2*

Koefisien determinan (R2) mengukur seberapa besar proporsi variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang melibatkan variabel-variabel bebas. Nilai R2 yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Akan tetapi, peningkatan nilai R2 seiring dengan penambahan variabel bebas tidak selalu menjamin peningkatan kualitas model. Penggunaan kriteria lain seperti Adjusted R2 dan uji signifikansi parameter perlu dilakukan untuk mengevaluasi model secara komprehensif<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Imam Ghazali, ‘Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25’ (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

<sup>82</sup> Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Deepublish, 2020)

<sup>83</sup> Sirilius Seran, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 188.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dirancang untuk melakukan pengujian empiris terhadap sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi memengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah Jawa Timur. Pada bab ini, akan dilakukan analisis data untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian ini menetapkan tingkat korupsi sebagai variabel yang menjadi fokus analisis (variabel dependen), sementara sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi merupakan variabel-variabel independen yang diuji pengaruhnya.

Jawa Timur terletak pada posisi geografis yang strategis, terbentang dari  $111^{\circ}00'$  BT sampai dengan  $114^{\circ}04'$  BT dan  $7^{\circ}12'$  LS sampai dengan  $8^{\circ}48'$  LS. Luas wilayahnya mencapai  $47.963 \text{ km}^2$ , menjadikannya salah satu provinsi terluas di Indonesia, serta jumlah penduduk lebih dari dari 37 juta jiwa (data BPS 2010) menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pusat perekonomian dan budaya di Indonesia. Pembagian administratifnya yang terdiri dari 38 unit pemerintahan, yaitu 29 kabupaten dan 9 kota. Tabel berikut ini menyajikan rincian pemerintah kabupaten dan kota di wilayah provinsi Jawa Timur<sup>84</sup>.

**Tabel 4. 1: Jumlah Pemkab dan Pemkot Jawa Timur**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemkab/ Pemkot	Jumlah Kecamatan	Letak kantor pemerintah
1	Kota Surabaya	1	31	Jalan Taman Surya No. 1 , Surabaya
2	Kab. Malang	1	33	Jl. Agus Salim No.7, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

<sup>84</sup> "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018–2022 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur," diakses 23 Januari 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjY3NiMx/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2018-2022.html>.

				65143
3	Kab. Sidoarjo	1	18	Jl . Gubernur Suryo No. 1 , Sidokumpul , Kec . Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61212
4	Kab. Jember	1	31	Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur
5	Kab. Banyuwangi	1	25	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 68416
6	Kab. Kediri	1	26	Jl. Soekarno-Hatta No.1 Kediri
7	Kab. Pasuruan	1	24	Jl. Raya Raci KM 9, Bangil, Raci, Pasuruan, Jawa Timur 67153
8	Kab. Bojonegoro	1	28	Jl. P. Mas Tumapel No. 1, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.
9	Kab. Lamongan	1	27	Lamongan, Jl. Lamongrejo, Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur
10	Kab. Jombang	1	21	Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur 614 19
11	Kab. Gresik	1	18	JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 102 B, Kebomas, Kec. Gresik, Kab. Gresik, Jawa Timur 61121
12	Kab. Tuban	1	20	No. 2, Jl. RA. Kartini, Kutorejo, Kec . Tuban , Ka b. Tuban , Jawa Timur 623 11
13	Kab. Mojokerto	1	18	Jl. KH. Hasyim Ashari.

				No. 12 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur Indonesia
14	Kab. Blitar	1	22	Jl. S. Supriadi No.17, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133
15	Kota Malang	1	5	Perkantoran Terpadu Pemerintah , Jl . Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
16	Kab. Probolinggo	1	24	Jl . Lumajang KM 05, Kedungasem, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67236
17	Kab. Nganjuk	1	20	Jalan Jendral Basuki Rahmat No. 1 , Mlilir , Berbek, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64473
18	Kab. Tulungagung	1	19	Ahmad Yani Timur No.37, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66212
19	Kab. Lumajang	1	21	JL Alun - Alun Utara No. 7 , Wonorejo , Kedungjajang , Kab. Lumajang , Jawa Timur 67358
20	Kab. Ponorogo	1	21	Desa Kradenan , Mangkujayan , Kecamatan Ponorogo, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63413
21	Kab. Ngawi	1	19	Jl. Teuku Umar No. 12, kec. Ngawi, kab. Ngawi.
22	Kab. Sumenep	1		Jl. KH. Mansur No. 71 Sumenep
23	Kab. Madiun	1	15	Jl. Mastrip No.23 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo

				Kota Madiun, Jawa Timur 63117
24	Kab. Magetan	1	18	Jl . Basuki Rahmat Timur No. 1 , Dusun Magetan, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur 63314
25	Kab. Trenggalek	1	14	Jl. Pemuda No.1 Trenggalek - Jawa Timur
26	Kab. Bondowoso	1	23	Jl. Letnan Karsono No. 1, Bondowoso
27	Kab. Bangkalan	1	18	Jalan Soekarno Hatta No 35 Bangkalan, Kab. Bangkalan
28	Kab. Sampang	1	14	Jl. Jamaluddin No.1A, Kelurahan Gunung Sekar, kec. Sampang, kab. Sampang.
29	Kab. Pacitan	1	12	Jl . Jaksa Agung Soeprapto No. 8 , Pacitan , Kec . Pacitan, Kab. Pacitan, Jawa Timur 63511
30	Kab. Situbondo	1	17	lokasi : Jl . PB. Sudirmana No.1, Situbondo, Jawa Timur
31	Kota Kediri	1	3	Jalan Basuki Rahmad No.15, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 64123
32	Kab. Pamekasan	1	13	Jl. Kabupaten No.107 Pamekasan 69316
33	Kota Batu	1	3	Jl . Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu , Kota Batu , Jawa Timur 65313
34	Kota Madiun	1	3	JL. Perintis Kemerdekaan No.32 Kota Madiun
35	Kota Pasuruan	1	4	JL . Pahlawan, No. 28, Pasuruan, Jawa Timur, 67155, Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur

				67126
36	Kota Probolinggo	1	5	Jl. Raya Panglima Sudirman No.19, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67211
37	Kota Mojokerto	1	3	Jl. Gajah Mada No.145, B alongsari, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314
38	Kota Blitar	1	3	Jl. Merdeka No.105, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117
Jumlah		38	666	

*Sumber: Diolah Peneliti (2025)*

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa website resmi pemerintah kota dan kabupaten, laporan kinerja kejaksaan tinggi Jawa Timur dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK perwakilan Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis 114 sampel data yang dikumpulkan dari 38 instansi selama periode 2021-2023.

**Tabel 4. 2: Sampel Penelitian**

No.	Kriteria sampel	Jumlah Sampel
1	Pemerintah Kota dan Kabupaten di provinsi Jawa Timur	38
2	Pemerintah Kota dan Kabupaten yang diaudit oleh BPK Perwakilan Jawa Timur dan tercatat dalam IHPD	38
3	Jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur X 3Tahun	$38 \times 3 = 114$
4.	Total Sampel	114

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2024)*

Semua pemerintah kota dan kabupaten memenuhi kriteria dan terpilih untuk dijadikan sampel penelitian ini.

## 4.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi sebagai variabel independen terhadap tingkat korupsi sebagai variabel dependen. Data akan diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS untuk mempercepat proses analisis.

### 4.2.1. Statistik deskriptif

Parameter statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum-maksimum untuk variabel sistem pengendalian internal (X1), temuan audit (X2), transparansi (X3) dan tingkat korupsi (Y) pada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2021-2023, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3: Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SPI	114	3	25	8.76	4.279
FIND	114	1	19	7.19	3.560
TRANS	114	1	4	3.46	.951
CORRUP T	114	0	18	3.89	2.937
Valid N (listwise)	114				

*Sumber: hasil output IBM Spss 25 (2025)*

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel independen pertama yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan jumlah data 114 untuk tahun 2021-2023 menghasilkan nilai minimum 3 dan nilai maksimum 25, menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam kualitas SPI di antara pemerintah daerah. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 8,76 dan standar deviasi 4,279. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi

mengisyaratkan bahwa data sistem pengendalian internal terdistribusi dengan baik dan menunjukkan hasil yang relatif positif. Hasil ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal untuk pemerintah daerah periode 2021-2023 yang menjadi sampel penelitian, kualitas SPI di pemerintah daerah pada level yang cukup baik.

Variabel independen yang kedua yaitu temuan audit atas ketidakpatuhan peundang-undangan yang memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 19 menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam tingkat ketidakpatuhan di antara pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki catatan ketidakpatuhan yang relatif rendah, sementara yang lainnya memiliki catatan yang lebih tinggi. Nilai rata-rata ketidakpatuhan temuan 7,19 dan nilai standar deviasi sebesar 3,560 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, ini menunjukkan bahwa data temuan ketidakpatuhan cenderung terdistribusi secara merata di sekitar nilai rata-rata. Artinya, sebagian besar pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota periode 2021-2023 memiliki jumlah temuan ketidakpatuhan yang tidak terlalu jauh berbeda dari rata-rata.

Selanjutnya, variabel independen yang ketiga adalah transparansi memiliki variasi yang terbatas, dengan nilai minimum 1 dan maksimum 4. Nilai rata-rata sebesar 3,46 dan standar deviasi 0,951 mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah kota telah menerapkan tingkat transparansi yang relatif sama. Artinya, penerapan transparansi pada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota tidak jauh berbeda dan penyimpangan masing-masing data transparansi relatif kecil.

Terakhir yaitu variabel dependen tingkat korupsi memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 18 menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup tinggi di antara pemerintah kota dan kabupaten yang diteliti. Nilai rata-rata 3,89, dan nilai standar deviasi 2,937, yang relatif kecil dari rata-rata. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kota dan kabupaten

memiliki tingkat korupsi yang relatif sama. Artinya, tidak ada banyak pemerintah kota dan kabupaten yang memiliki tingkat korupsi yang jauh di atas atau di bawah rata-rata.

#### 4.2.2. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Temuan dari uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha ( $0,097 > 0,05$ ), seperti yang terlihat pada tabel 4.4. Hasil ini telah melalui pengujian normalitas, dengan demikian data penelitian ini memenuhi asumsi distribusi normal. Berikut tabel dari hasil Uji Normalitas Data, dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4. 4: Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	0,121
	Positive	0,106
	Negative	-0,121
Kolmogorov-Smirnov Z		1,231
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,097
a. Test distribution is Normal.		
b. User-Specified		

Sumber: Output IBM Spss 25, 2025

##### 2. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi yang disebabkan oleh adanya hubungan linier yang kuat antar variabel independen. Kondisi multikolinearitas yang tinggi ditandai dengan nilai VIF  $> 10$  atau nilai

torelance  $< 0,1$ . Nilai-nilai ini menunjukkan ketergantungan antara variabel independen dalam model regresi. Untuk hasil uji multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 5: Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SPI	0,965	1,037
	FIND	0,962	1,039
	TRANS	0,998	1,002
a. Dependent Variable: CORRUPT			

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025.

Hasil pengujian multikolinearitas, yang disajian pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai VIF variabel sistem pengendalian internal (X1), temuan audit (X2), dan transparansi (X3)  $< 10$ , dan nilai torelance  $> 0,1$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan asumsi tidak adanya analisis multikolinearitas dalam regresi telah terpenuhi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi di mana varian dari residual tidak konstan. Uji *Glejser* digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Berasarkan uji *Glejser*, keputusan mengenai adanya heteroskedastisitas diambil dengan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas. Dibawah ini merupakan hasil dari Uji Glejser, sebagai berikut:

**Tabel 4. 6: Hasil Uji Glejser**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
		B	Std. Error			
1	(Constant)	0,467	0,224		2,088	0,039
	SPI	-0,002	0,010	-0,018	-0,170	0,865
	FIND	0,012	0,012	0,109	1,067	0,288
	TRANS	0,002	0,052	0,004	0,042	0,967

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025

Berdasarkan tabel terlampir, dapat diamati bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel independen (yaitu, sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi) adalah  $> 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa data penelitian bebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dengan *Durbin Watson* diperoleh nilai sebesar 2,149. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ( $N$ ) = 114 dan jumlah variabel independen ( $K$ ) = 3. Nilai ini berada dalam rentang antara nilai batas bawah ( $d_L$ ) = 1,6410 serta nilai batas atas ( $d_U$ ) = 1,7488, serta nilai  $4-d_U$  sebesar 2,2512. Keputusan uji autokorelasi diambil berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus  $d_U < d < 4 - d_U$  ( $1,7488 < 2,149 < 2,2512$ ) nilai 2,149 terletak dalam interval yang ditentukan nilai batas atas ( $d_U$ ) = 1,7488 dengan  $4 - d_U = 4 - 1,7488$ . Berdasarkan analisis autokorelasi yang telah dilakukan dan mengkonfirmasi tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Detai hasil pengujian terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7: Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.190 <sup>a</sup>	0,036	0,010	2,922	2,149
a. Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND					
b. Dependent Variable: CORRUPT					

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linier

##### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini merupakan hasil uji regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 8: Hasil Uji Regresi Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,678	0,478			0,001
	SPI	0,072	0,027	0,236	2,689	0,008
	FIND	0,030	0,032	0,081	0,918	0,361
	TRANS	-0,403	0,102	-0,340	-3,939	0,000

a. Dependent Variable: CORRUPT1

*Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025.*

Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa temuan dari analisis regresi linier berganda yang mengindikasikan adanya hubungan antara variabel sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,678 + 0,072 X_1 + 0,030 X_2 + (-0,403 X_3) + e$$

Ket:

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

e = error estimated

Y = Tingkat Korupsi

X1 = Sistem Pengendalian Internal

X2 = Temuan Audit

X3 = Transparansi

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$\alpha$  = nilai konstanta sebesar 1,678 dalam persamaan regresi menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen (X1, X2, dan X3) bernilai nol, maka tingkat korupsi akan meningkatkan nilai sebesar 1,678.

$\beta_1$  = nilai koefisien sistem pengendalian internal adalah 0,072, nilai positif yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan searah antara variabel sistem pengendalian internal dengan variabel tingkat korupsi. Artinya, ketika variabel independen lainnya tetap, peningkatan sebesar 1 satuan dalam sistem pengedalian internal akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,072 satuan dalam tingkat korupsi.

$\beta_2$  = nilai koefisien temuan audit sebesar 0,030, nilai positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara temuan audit dan tingkat korupsi. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan, kenaikan sebesar 1 satuan dalam temuan audit berkontribusi terhadap peningkatan tingkat sebesar 0,030 satuan pada tingkat korupsi.

$\beta_3$  = nilai koefisien transparansi sebesar -0,403, nilai negatif menandakan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel transparansi dengan variabel tingkat korupsi. Artinya ketika variabel independen lain nilainya tetap dan transparansi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai tingkat korupsi mengalami penurunan sebesar 0,403 satuan.

## 2. Uji Statistik t

Berdasarkan parameter  $n = 114$ ,  $k = 4$ , dan  $\alpha = 0,05$ , serta derajat kebebasan (df) dihitung  $(n - k - 1)$  atau  $114 - 4 - 1 = 110$ . Dengan demikian, nilai t tabel yang diperoleh adalah  $\pm 1,981$ . Hasil Uji Statistik t dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 9: Hasil Uji Statistik t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.	Beta		

				Error			
1	(Constant)	1,678	0,478				0,001
	SPI	0,072	0,027		0,236	2,689	0,008
	FIND	0,030	0,032		0,081	0,918	0,361
	TRANS	-0,403	0,102		-0,340	-3,939	0,000
a. Dependent Variable: CORRUPT1							

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a) Pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif (**Ha**) **diterima**. Hal ini didasarkan pada nilai t hitung  $2,689 > t$  tabel  $1,981$ , serta nilai signifikansi  $0,008$  yang kurang dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  ( $0,008 < 0,05$ ). Dengan demikian variabel independen yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat korupsi.

- b) Pengaruh variabel temuan audit terhadap tingkat korupsi

Temuan audit tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsiberdasarkan analisis statistik, yang ditunjukkan oleh t hitung yang lebih kecil dari t tabel ( $0,918 < 1,981$ ), dan nilai signifikansi yang lebih besar dari nilai tingkat signifikansi yang ditetapkan  $\alpha = 0,05$  ( $0,361 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan **Ha diterima**.

- c) Pengaruh variabel transparansi terhadap tingkat korupsi

Analisis statistik menunjukkan bahwa transparansi secara signifikan mempengaruhi tingkat korupsi. Hal ini didukung nilai t hitung (nilai negatif tidak memengaruhi daerah kritis)  $3,939 > t$  tabel ( $1,981$ ) dan nilai signifikansi lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan **Ha diterima**.

### 3. Uji Statistik F

Tabel dibawah ini merupakan hasil dari Uji Statistik F dalam penelitian ini, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 10: Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	35,284	3	11,761	8,192
	Residual	157,922	110	1,436	
	Total	193,206	113		

a. Dependent Variable: CORRUPT1  
b. Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,192 dengan signifikansi 0,001. Nilai F hitung akan diuji dengan membandingkan nilai F tabel untuk menentukan signifikansi hasil penelitian, dengan derajat kebebasan  $n - k - 1 = 114 - 4 - 1 = 109$ , dengan  $\alpha = 0,05$  dimana  $0,001 < 0,05$ . Dari F hitung 8,192 dan F tabel 2,45, maka  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  ( $8,192 > 2,45$ ), maka  $H_0$  ditolak dan **Ha diterima**. Demikian variabel sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat korupsi.

### 4. Uji Koefisien Determinasi Adjusted R2

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R square) bernilai 0,160, yang berarti 16%. Artinya, variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi memiliki pengaruh 16% terhadap tingkat korupsi. Hal ini mengindikasikan 84% adanya variabel lain yang mungkin lebih memengaruhi tingkat korupsi. Hasil uji koefisien determinasi adjusted R2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 11: Hasil Uji Koefisien determinasi Adjusted R2**

Model Summary
---------------

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 <sup>a</sup>	0,183	0,160	1,198

a.Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND  
b.Independent Variable: CORRUPT

Sumber: Hasil Output IBM Spss 25, 2025

#### 4.3. Pembahasan Penelitian

Penelitian terkait pengaruh sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transaparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2021-2023 memperoleh keputusan sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat Korupsi

$H_01 \neq$  tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi

$H_1 =$  terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi

Berdasarkan analisis hasil regresi linier berganda dan uji t, diperoleh koefisien sistem pengendalian internal sebesar 0,072. Nilai koefisien positif ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian internal dengan tingkat korupsi. Melalui analisis uji t diperoleh nilai sistem pengendalian internal t hitung  $(2,689) > t$  tabel  $(1,981)$  dan  $p$  value  $0,008$  atau dibawah nilai tingkat signifikansi  $(\alpha = 0,05)$ . Dengan demikian, dapat dikatakan semakin banyak kelemahan yang ditemukan dalam sistem pengendalian internal, maka semakin besar pula potensi terjadinya korupsi.

Oleh karena itu,  **$H_01$  ditolak** dan  **$H_1$  diterima**.

Berikut penjelasannya: pemerintah Kota Bojonegoro dengan temuan kelemahan SPI  $11 >$  rata-rata  $8,76$  mempunyai tingkat korupsi sebesar  $6 >$  rata-rata  $3,89$ , sedangkan pemerintah Kabupaten Sumenep dengan temuan kelemahan SPI  $6 <$  rata-rata  $8,76$  memiliki tingkat korupsi sebesar  $1 <$  rata-rata  $3,89$ . Berdasarkan keterangan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa temuan kelemahan atas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Artinya, pemerintah dengan kelemahan sistem pengendalian internal yang lebih banyak memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terlibat dalam korupsi, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian secara berkala.

Kondisi yang ditemukan mendukung kerangka teori yang menjadi landasan penelitian ini. Teori agensi memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami hubungan antara kelemahan SPI dan korupsi. Ketika sistem pengendalian internal lemah, pengawasan terhadap tindakan pejabat menjadi kurang efektif, sehingga membuka peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan koruptif. Selain itu, kelemahan SPI juga memungkinkan manipulasi informasi dan semacamnya mekanisme akuntabilitas, yang pada penguatan insentif untuk bertindak oportunistik, dapat disimpulkan bahwa kelemahan SPI secara signifikan berkontribusi pada peningkatan tingkat korupsi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Raden Suhartono yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>85</sup>. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aznedra, Nurhayaty, dan Rizki yang menjelaskan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>86</sup>.

## 2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

$H_0$ 2 ≠ tidak terdapat pengaruh antara temuan audit terhadap tingkat korupsi

$H_a$ 2 = terdapat pengaruh antara temuan audit terhadap tingkat korupsi

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan uji t, menunjukkan bahwa koefisien temuan audit adalah 0,030. Nilai positif ini mengartikan bahwa terdapat hubungan searah antara temuan audit dan

---

<sup>85</sup> Suhartono, "Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia."

<sup>86</sup> Aznedra, Nurhayaty, dan Putra, "Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi Kasus Skpd Kepulauan Riau)."

tingkat korupsi. Hasil uji t temuan audit menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,918 yang lebih kecil < dari nilai t tabel 1,981, serta *p value* 0,361 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Analisis data menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara temuan audit dengan tingkat korupsi.

Oleh karena itu, **Ha2 ditolak dan H<sub>0</sub>2 diterima**.

Berikut penjelasannya: Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan temuan audit 12 > rata-rata 7,19 mempunyai tingkat korupsi sebesar 11 > rata-rata 3,89, dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan temuan audit 14 > rata-rata 7,19 memiliki tingkat korupsi sebesar 3 < rata-rata 3,89. Dari keterangan tersebut, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa temuan audit, baik tinggi maupun rendah, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun audit merupakan alat yang penting dalam upaya pencegahan korupsi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konteks dan faktor-faktor lain yang menyertainya. Selain itu, audit seringkali lebih fokus pada ketidakpatuhan terhadap prosedur dan peraturan, daripada motivasi dan perilaku koruptif yang mendasar. Tindakan koruptif seringkali dilakukan dengan cara yang terselubung dan sulit dideteksi melalui audit biasa. Teori agensi menyatakan bahwa agen selalu bertindak rasional dan memaksimalkan keuntungan pribadi. Faktanya, perilaku manusia lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan oleh Chritine, Rindu dan Fika yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>87</sup>. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan

---

<sup>87</sup> Cinintya, Gamayuni, dan Dharma, "Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia."

penelitian yang dilakukan oleh Mauri Stela dan Haryanto yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>88</sup>.

### 3. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi

$H_03 \neq$  tidak terdapat pengaruh antara transparansi terhadap tingkat korupsi

$H_{a3}$  = terdapat pengaruh antara transparansi terhadap tingkat korupsi

Hasil dari pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda dan uji t, diperoleh koefisien transparansi sebesar 0,403. Nilai negatif menjelaskan terdapat adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel transparansi dengan variabel tingkat korupsi, yang berarti peningkatan transparansi akan diikuti oleh penurunan tingkat korupsi, atau sebaliknya. Nilai t hitung untuk variabel transparansi sebesar 3,939, yang secara signifikan lebih besar dari nilai  $t$  tabel 1,981, dan  $p$  value 0,000 atau dibawah nilai *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Sehingga transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Oleh karena itu  **$H_03$  ditolak** dan  **$H_{a3}$  diterima**.

Berikut penjelasannya: pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan nilai transparansi  $4 >$  rata-rata 3,40 memiliki tingkat korupsi sebesar  $0 <$  rata-rata 3,89, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan nilai transparansi  $1 <$  rata-rata 3,40 memiliki tingkat korupsi sebesar  $6 >$  rata-rata 3,89. Berdasarkan hasil analisis regresi dan keterangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat transparansi dan tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat transparansi suatu daerah, semakin rendah tingkat korupsinya.

Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa transparansi berperan penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh teori agensi, yang menggarisbawahi peran transparansi dalam pengawasan. Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintah, sehingga meminimalkan peluang

---

<sup>88</sup> Mauristela dan Haryanto, "Efektivitas Temuan Fraud Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Opini Audit Oleh Bpk Dalam Mempengaruhi Tingkat Korupsi Pada Provinsi Di Pulau Jawa Periode Tahun 2015 - 2019."

terjadinya penyimpangan. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan transparansi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui regulasi maupun teknologi.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang serupa dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Salwa dan Dedik yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>89</sup>. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian Saraswati dan Triyanto bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi<sup>90</sup>.

#### **4. Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Korupsi**

$H_04 \neq$  tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian Internal, temuan audit dan transparansi terhadap tingkat korupsi

$H_{a4}$  = terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal, temuan audit dan transparansi terhadap tingkat korupsi

Sejalan dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji F, nilai F hitung (98,192) terbukti secara nyata lebih besar daripada nilai F tabel (2,45) pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti model regresi yang diuji secara signifikan dapat menjelaskan variasi dalam tingkat korupsi. Dengan demikian,  **$H_04$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima**.

Temuan penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi hipotesis penelitian, tetapi juga memberikan bukti empiris yang kuat bahwa sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Artinya, perbaikan pada ketiga variabel secara bersamaan dan terintegrasi akan

---

<sup>89</sup> Nafisah, Triyanto, dan Universitas Telkom Bandung Indonesia, “Transparency, Accountability, and Audit Findings in Bpk Ri to Minimizing the Level of Corruption.”

<sup>90</sup> Saraswati dan Triyanto, “The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption.”

memberikan dampak yang lebih besar dalam upaya menurunkan tingkat korupsi dibandingkan jika dilakukan secara parsial.

Terdapat konsistensi antara hasil penelitian ini dan penelitian Suhartono, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan mempengaruhi tingkat korupsi<sup>91</sup>. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira dan Dedik bahwa temuan audit dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi<sup>92</sup>. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Aznedra, Nurhayaty dan Putra bahwa sistem pengendalian internal dan temuan audit ketidakpatuhan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat korupsi<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Suhartono, “Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.”

<sup>92</sup> Saraswati dan Triyanto, “The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption.”

<sup>93</sup> Aznedra, Nurhayaty, dan Putra, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi Kasus Skpd Kepulauan Riau).”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Setelah melalui proses analisis data yang komprehensif, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2021-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak kelemahan dalam sistem pengendalian internal, semakin tinggi pula terjadinya potensi korupsi.
2. Temuan audit atas ketidakpatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Artinya, meskipun temuan audit atas ketidakpatuhan dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan koruptif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ini belum cukup efektif dalam mengurangi praktik korupsi di pemerintah daerah.
3. Transparansi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi pemerintah disertai dengan penurunan tingkat korupsi di pemerintahan daerah.
4. Sistem pengendalian internal, temuan audit, dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2021-2023. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor ketiga tersebut bersama-sama

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan-keterbatasan berikut perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini, meskipun penelitian telah dilakukan dengan teliti, yaitu:

1. Keterbatasan objek penelitian yang mencakup pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dengan mencakup wilayah yang lebih luas disarankan untuk memvalidasi temuan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *R square* variabel independen hanya sebesar 16%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 84% variasi variabel independen dalam model regresi.

### **5.3. Saran**

Penelitian ini menyadari adanya beberapa keterbatasan, namun demikian hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi bagi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan pencegahan tindak korupsi. sebagai tindak lanjut penelitian ini, beberapa saran berikut diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dan peneliti selanjutnya:

1. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, meningkatkan kualitas audit, serta memperluas akses publik terhadap informasi keuangan negara, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efisien dan akuntabel.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya dalam hal pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan baru bagi para pembaca yang tertarik dengan isu *Good Governance* dan akuntabilitas publik.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel-variabel kontekstual seperti tingkat pendidikan kepala daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih kuat terhadap tingkat korupsi. Selain itu, penelitian longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika tingkat korupsi dan pengaruh faktor-faktor eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, Rafrini, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, dan Shinta Budi. 2020. “Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)[Audit Finding And Audit Rectification On Audit Opinion (Case Study-Provincials Government Of Republic Indonesia)].” *Jurnal Penelitian Akuntansi (JPA)* 1, no. 1: 14–27.
- Astuti, Runik Sri. 30 September 2024. “Didakwa Korupsi Insentif ASN Rp 1,4 Miliar, Bupati Sidoarjo Terancam Hukuman Seumur Hidup.” kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/30/didakwa-korupsi-insentif-asn-rp-14-miliar-bupati-sidoarjo-terancam-hukuman-seumur-hidup>.
- Aznedra, Aznedra, Nurhayaty Nurhayaty, dan Rizki Eka Putra. 30 Juni 2020. “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi Kasus Skpd Kepulauan Riau).” *EQUILIBIRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi* 7, no. 1. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi/article/view/2622>.
- Bhul, Baburam. 29 Desember 2023. “The Role of Government Auditing for Combating Corruption and Promoting Integrity in Nepal.” *Khwopa Journal* 5, no. 2: 1–13. <https://doi.org/10.3126/kjour.v5i2.60328>.
- Cinintya, Christine, Rindu Rika Gamayuni, dan Fitra Dharma. 2022. “Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.” *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 9: 2721–35.
- Darma, Budi. 2021. *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)*. GUEPEDIA.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1 Januari 1989. “Agency Theory: An Assessment and Review.” *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>.
- Ghozali, Imam. 2018. “Aplikasi analisis multivariete SPSS 25.” Semarang: Universitas Diponegoro. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=11086144504379246298&hl=en&oi=scholarr>.
- Hadits.id. “Hadits Majah No. 2304 | Terguran untuk berlaku zhalim dan korup.” Diakses 3 Februari 2025. <http://www.hadits.id/hadits/majah/2304>.
- Hans, Rizal. “Data Sekunder : Metode Analisis, Serta Kelebihan Kekurangannya.” Diakses 24 Oktober 2024. <https://dqlab.id/data-sekunder-metode-analisis-serta-kelebihan-kekurangannya>.

- Hibberts, Mary, R. Burke Johnson, dan Kenneth Hudson. 2012. "Common Survey Sampling Techniques." Dalam *Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences*, disunting oleh Lior Gideon, 53–74. New York, NY: Springer New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3876-2\\_5](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3876-2_5).
- Istiariani, Irma. 30 Juli 2024. "The Role of Religiosity and Spirituality as Efforts to Prevent Financial Reporting Fraud." *BALANCE: JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING* 5, no. 1: 17–36. <https://doi.org/10.21274/balance.v5i1.8383>.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. 2012. "Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS," t.t.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1 Oktober 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4: 305–60. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018–2022 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur." Diakses 23 Januari 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjY3NiMx/jumlah-kecamatan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2018-2022.html>.
- "Kasus Suap dan Gratifikasi DAK di Kabupaten Malang Tahun 2018." Diakses 7 November 2024. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/kasus-suap-dan-gratifikasi-dak-di-kabupaten-malang-tahun-2018>.
- Kemenag. "Terjemah Qur'an," 2019.
- Khairudin, Khairudin, dan Rina Erlanda. 2016. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera) - Neliti". <https://www.neliti.com/publications/94237/pengaruh-transparansi-dan-akuntabilitas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-lkpd>.
- Khaliful, Azhar. 2015. "Pengaruh Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Korupsi Kementerian Lembaga Di Indonesia = The Effect of Audit Findings and Follow up of Audit Recomendation on Corruption of Ministry Agency in Indonesia / Khaliful Azhar." Universitas Indonesia Library. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>.
- Kini, War, Icuk Rangga Bawono, dan Yanuar E Restianto. 10 Maret 2021. "Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah." *AKUNTANSI DEWANTARA* 4, no. 2: 113–27. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>.
- Kitgaard, Robert E., Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris. 2000. *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*. Oakland, Calif.: Ics Pr.

- Kurniawati, Anggreni Dian, dan Yohanes Mario Pratama. 2016. “The Role of Government Auditing in Controlling the Level of Corruption in Indonesia.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 25, no. 1 (2021): 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>.
- Lidyah, Rika. “Korupsi Dan Akuntansi Forensik” 2, no. 2.
- Liu, Jin, dan Bin Lin. Juni 2012. “Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China’s Provincial Panel Data.” *China Journal of Accounting Research* 5, no. 2: 163–86. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>.
- Mattoasi, Mattoasi, Didiet Pratama Musue, dan Yaman Rauf. 21 Agustus 2021. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.” *Jambura Accounting Review* 2, no. 2: 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>.
- Maulana, Zefri, dan Nasrul Kahfi Lubis. 11 Oktober 2020. “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 4, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.33059/jensi.v4i1.2660>.
- Mauristela, Mauristela, dan Haryanto Haryanto. 26 April 2022. “Efektivitas Temuan Fraud Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dan Opini Audit Oleh Bpk Dalam Mempengaruhi Tingkat Korupsi Pada Provinsi Di Pulau Jawa Periode Tahun 2015 - 2019.” *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33879>.
- Media, Kompas Cyber. (7 November 2024). “KPK Periksa Eks Ketua DPRD Jawa Timur, Dalami Proses Turunnya Dana Hibah dari APBD.” KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/09420071/kpk-periksa-eks-ketua-dprd-jawa-timur-dalami-proses-turunnya-dana-hibah-dari>.
- Metodologi penelitian.* Diakses 13 Oktober 2024. [https://books.google.com/books/about/Metodologi\\_penelitian.html?hl=id&id=tTykAQAAQAAJ](https://books.google.com/books/about/Metodologi_penelitian.html?hl=id&id=tTykAQAAQAAJ).
- Nafisah, Salwa, dan Dedik Nur Triyanto. Desember 2019. “Transparency, Accountability, and Audit Findings in Bpk Ri to Minimizing the Level of Corruption.” *Research In Management and Accounting* 2, no. 2: 67–75. <https://doi.org/10.33508/rima.v2i2.2603>.
- Naibaho, Eva Novita Sari, dan Yunita Kurnia Shanti. 9 Januari 2022. “Pengaruh Temuan Audit, Opini, Tindaklanjuti Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Kementerian/Lembaga.” *Jurnal Akuntansi Barelang* 6, no. 1: 25–40. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i1.4557>.

- Nasrum, Akbar. 28 Februari 2018. "Uji Normalitas Data Untuk Penelitian." *Jayapangus Press Books*, i–117.
- Ningsih, Siti Triya Setia. 2022. "Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi".
- Nurfaidah, Nurfaidah, dan Novita Novita. 12 Maret 2022. "Bagaimana Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia ?" *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 2: 259–69. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1529>.
- Perdana, Aditya Inggit, dan Tri Joko Prasetyo. 12 Juni 2023. "Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan Apbd Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 2: 74–89. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266>.
- Pramesti, Lia, dan Haryanto Haryanto. 29 Juli 2019. "Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2: 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>.
- Purnomo, Budi S. 27 April 2014. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 1: 276–88. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6581>.
- Raharjo, Eko. 2007. "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi" 2, no. 1.
- Raharjo, Sahid. "Uji Heteroskedastisitas Glejser dengan SPSS Sangat Lengkap." *Dipetik* 3, no. 10 (2014): 2020.
- Rahman, Fathur. 2011. "Korupsi Di Tingkat Desa" Vol.2, No.1.
- Rinjani, rinjani. 2022. "Peran Auditor Internal Dan Auditor Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" 2.
- Said, Hilda Salman, Chusnul Khotimah, Dekri Ardiansyah, Hanifah Khadrinur, dan Marsheli Indira Putri. 25 Desember 2022. "Teori agensi : Teori agensi dalam perspektif akuntansi syariah." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 5: 2434–39. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2757>.
- Saraswati, Safira Rifka, dan Dedik Nur Triyanto. 2020. "The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption.".
- Satria, M Rizal. 2022. "Peran Teori Agensi Dalam Issue Bidang Akuntansi" 3.

- Seran, Sirilius. 2020. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6441050992165131246&hl=en&oi=scholarr>.
- Sesneg, Staf. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia," t.t.
- Sonbay, Yolinda Yanti. 30 Juni 2022. "Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti." *Ekuitas (jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 6, no. 2: 204–23. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5176>.
- Sugiarto, Robby, dan Gunawan Santoso. 2012. "Peran Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Audit Delay" 1, no. 2.
- Suhardjanto, Djoko, Djuminah, dan Sri Wahyu Agustiningsih. 2020. "Regional Financial Performance, Audit Findings, and Corruption Levels in Indonesia" 20, no. 1.
- Suhartono, Raden. 22 April 2021. "Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia." *MAKSI UNTAN* 6, no. 2. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/45298>.
- Sukmawati, Anastasia suci, Gusti Rusmayadi, Mekar Meilisa Amalia, Hikmah Hikmah, Nini Apriani Rumata, M. Afdhal Chatra P, Ashari Abdullah, dkk. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syahrir, Riri Safira, dan Elly Suryani. 30 Maret 2020. "Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017)." *JAF (Journal of Accounting and Finance)* 4, no. 1: 20–28. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>.
- Tania Angela, Marsellisa Nindito, dan Hera Khairunnisa. 25 Desember 2023. "Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 4, no. 2: 506–25. <https://doi.org/10.21009/japa.0402.11>.
- "TPK Berdasarkan Instansi." Diakses 24 September 2024. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.
- transparency International Indonesia. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia," 2024. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- "Tren | ICW." Diakses 6 November 2024. <https://antikorupsi.org/category/tren>.
- "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023 | ICW." Diakses 19 September 2024. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>.

- W, RM Syah Arief Atmaja, dan Agung Nur Probohudono. 2015. “Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 1, no. 1: 81–110. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.115>.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Riset Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zaki, M., dan Saiman Saiman. 16 Maret 2021. “Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 2: 115–18. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i2.216>.

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1: Permintaan Informasi/Data



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

### PERNYATAAN KESEDIAAN PENYERAHAN HASIL PENGGUNAAN INFORMASI/DATA

Nomor : /PPI/PIK.SBY/ /2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

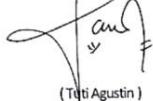
a. Nama	: <u>Tuti Agustin</u>
b. Nomor Identitas (NIK/SIM/NIM/LAINNYA)	: <u>2105046132</u>
c. Program Studi	: <u>Akuntansi Syariah</u>
d. Nama Lembaga/Instansi	: <u>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</u>
e. Tujuan Penggunaan Informasi	: <u>Untuk Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)</u>
f. Judul Penelitian*	: <u>PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEMUAN AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI [Studi Kasus Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2021-2023]</u>
g. Alamat Sesuai Kartu Identitas	: <u>Dusun Krajan 1, RT/RW 001/001, Desa Cigugur, Kec. Pusakajaya, Kab. Subang</u>
h. E-mail	: <u>tutiaugustin66@gmail.com</u>
i. No. Telepon/Handphone	: <u>089515431247</u>

Menyatakan bahwa :

- 1 Saya tidak akan menyalahgunakan informasi/data yang telah diterima.
- 2 Saya akan menggunakan informasi/data yang telah diterima sesuai dengan tujuan permintaan.
- 3 Saya akan memberikan output atas penggunaan informasi/data yang telah diterima ke BPK Jatim sesuai dengan ketentuan yang telah saya pahami.
- 4 Saya akan mencantumkan sumber informasi pada setiap laporan/publikasi atas nama saya kepada pihak manapun.
- 5 Apabila saya menyalahgunakan/ menggunakan tidak sesuai tujuan/ tidak memberikan output atas penggunaan informasi/data tersebut, maka BPK Perwakilan Jatim berhak mempertimbangkan permohonan atas informasi/data selanjutnya.

Sidoarjo, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,



(Tuti Agustin)

\* Jika Penggunaan informasi/data untuk penelitian/kajian/evaluasi/bahan lainnya

Catatan:

1. Tanda tangan yang telah ditandatangani harap dikirimkan melalui faksimile ke 031-8661852 atau melalui e-mail ke [humas.jatim@bpk.go.id](mailto:humas.jatim@bpk.go.id);
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silahkan menghubungi kami di nomor 031-8669244 ext 734/102 atau 031-8661852.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERNYATAAN KESEDIAAN PENYERAHAN HASIL PENGGUNAAN INFORMASI/DATA

Nomor : /PPI/PIK.SBY/ /2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

- a. Nama : Tuti Agustin  
b. Nomor Identitas (NIK/SIM/NIM/LAINNYA) : 2105046132  
c. Program Studi : Akuntansi Syariah  
d. Nama Lembaga/Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
e. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)  
f. Judul Penelitian\* : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEMUAN AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI [Studi Kasus Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2021-2023]  
g. Alamat Sesuai Kartu Identitas : Dusun Krajan 1, RT/RW 001/001, Desa Cigugur, Kec. Pusakajaya, Kab. Subang  
h. E-mail : tutiagustin66@gmail.com  
i. No. Telepon/Handphone : 089515431247

Menyatakan bahwa :

- 1 Saya tidak akan menyalahgunakan informasi/data yang telah diterima.
- 2 Saya akan menggunakan informasi/data yang telah diterima sesuai dengan tujuan permintaan.
- 3 Saya akan memberikan output atas penggunaan informasi/data yang telah diterima ke BPK Jatim sesuai dengan ketentuan yang telah saya pahami.
- 4 Saya akan mencantumkan sumber informasi pada setiap laporan/publikasi atas nama saya kepada pihak manapun.
- 5 Apabila saya menyalahgunakan/ menggunakan tidak sesuai tujuan/ tidak memberikan output atas penggunaan informasi/data tersebut, maka BPK Perwakilan Jatim berhak mempertimbangkan permohonan atas informasi/data selanjutnya.

Sidoarjo, 08 Januari 2025

Yang Menyatakan,

  
(Tuti Agustin)

\* Jika Penggunaan informasi/data untuk penelitian/kajian/evaluasi/bahan lainnya

Catatan:

1. Tanda terima yang telah ditandatangani harap dikirimkan melalui faksimile ke 031-8661852 atau melalui e-mail ke [humas.jatim@bpk.go.id](mailto:humas.jatim@bpk.go.id);
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silahkan menghubungi kami di nomor 031-8669244 ext 734/102 atau 031-8661852.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

Nomor: /PI-PD/PIK.SBY/ /2025

Telah terima informasi berupa

I. Jenis Data/Informasi

: Data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab dan Pemkot

II. Tujuan Penggunaan Informasi

: Untuk Penelitian Tugas Akhir (SKRIPSI)

III. Bentuk Data/Informasi

:  Softcopy  
 Hardcopy

IV. Peminta Data

- a. Nama
- b. Jabatan
- c. Lembaga
- d. Alamat

: Tuti Agustin  
: Mahasiswa  
: UIN WALISONGO SEMARANG  
: Jln. Taman Karonsih No.655  
kec. Ngaliyan Kota Semarang  
: 089515431247

e. No. Telepon/Handphone

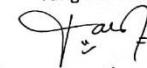
Telah menerima dan menyatakan bahwa informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dan perlakuan informasi ini setelah keluar dari kantor BPK menjadi tanggung jawab peminta informasi.

Sidoarjo, 2025

Yang Menyerahkan,

( )

Yang Menerima,

  
( Tuti Agustin )

Catatan:

1. Tanda terima yang telah ditandatangani harap dikirimkan melalui faksimile ke 031-8661852 atau melalui e-mail ke [humas.jatim@bpk.go.id](mailto:humas.jatim@bpk.go.id);
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silahkan menghubungi kami di nomor 031-8669244 ext 103, 106 atau 031-8661852.



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR  
Jalan Raya Juanda, Sidoarjo  
Telepon: (031) 8669244 Ext. 734, Fax: (031) 8661852, WA Pengaduan 0811 322 99 000  
Email: humas.jatim@bpk.go.id, Website: jatim.bpk.go.id

Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih apabila Anda berpartisipasi dan berkenan meluangkan waktu untuk mengisi *Survei Kepuasan Masyarakat* ini, dan memberikan saran pada tempat yang telah disediakan.

Nama : **Tuti Agustin** Tanggal : **22 Januari 2025**  
Jenis Kelamin : **K / P** Jenis Layanan yang Diterima:  
Usia : **21**  Permintaan Informasi Publik  
Pendidikan :  Pengaduan Masyarakat  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Instansi/Organisasi : **UIN Walisongo**

Berilah tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia.

No.	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
1.	Persyaratan layanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	a. Sangat Sesuai <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai c. Kurang Sesuai d. Tidak Sesuai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur/tata cara pelayanan di BPK Jatim?	a. Sangat Mudah <input checked="" type="checkbox"/> Mudah c. Kurang Mudah d. Tidak Mudah
3	Waktu layanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	<input checked="" type="checkbox"/> Sangat Cepat b. Cepat c. Kurang Cepat d. Tidak Cepat
4	Biaya/Tarif	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di BPK Jatim?	<input checked="" type="checkbox"/> Gratis b. Murah c. Cukup Mahal d. Mahal
5	Produk spesifikasi Jenis layanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?	a. Sangat Sesuai <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai c. Kurang Sesuai d. Tidak Sesuai
6	Kompetensi Pelaksana	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	a. Sangat Kompeten <input checked="" type="checkbox"/> Kompeten c. Kurang Kompeten d. Tidak Kompeten
7	Perilaku Pelaksana	Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas (sopan dan ramah) dalam memberikan pelayanan?	a. Sangat Sopan dan Ramah <input checked="" type="checkbox"/> Sopan dan Ramah c. Kurang Sopan dan Ramah d. Tidak Sopan dan Ramah
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan, saran, dan masukan pengguna layanan kepada BPK Jatim?	a. Sangat Baik <input checked="" type="checkbox"/> Baik c. Cukup d. Buruk
9	Kesediaan Sarana dan Prasarana	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	a. Sangat Baik <input checked="" type="checkbox"/> Baik c. Cukup d. Buruk

D. MASUKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

Kritik dan Saran untuk kami:

Terima kasih atas partisipasi Saudara, semoga hasil survei ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna untuk peningkatan kualitas dan layanan kami di masa yang akan datang.



Telusuri dalam email



L

LHP LKPD (via Google Drive) 13 Jan  
Folder dibagikan kepada Anda: "LH...  
LHP LKPD membagikan folder LHP... 

L

LHP LKPD (via Google Drive) 13 Jan  
Folder dibagikan kepada Anda: "LH...  
LHP LKPD membagikan folder LHP... 

L

LHP LKPD (via Google Drive) 13 Jan  
Folder dibagikan kepada Anda: "LH...  
LHP LKPD membagikan folder LHP... 

## Lampiran 2: Data Penelitian

### Data Variabel Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit, Transparansi dan Korupsi Periode 2021-2023

No.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tahun	SPI (X1)	FIND (X2)	TRANS (X3)	CORRUPT (Y)
1	Kab Bojonegoro	2021	8	8	1	1
2	Kota Probolinggo		8	10	4	3
3	Kota Surabaya		5	6	4	9
4	Kab Tuban		7	6	4	2
5	Kab Tulungagung		11	9	4	1
6	Kab Trenggalek		9	7	4	1
7	Kab Pasuruan		13	7	4	6
8	Kab Lamongan		11	11	4	2
9	Kota Pasuruan		7	9	2	3
10	Kab Gresik		7	8	4	3
11	Kota Malang		13	12	4	3
12	Kab Sidoarjo		4	5	3	2
13	Kota Mojokerto		14	14	3	3
14	Kab Probolinggo		12	4	4	2
15	Kab Nganjuk		4	6	2	1
16	Kab Sampang		8	5	2	1
17	Kab Kediri		18	19	4	1
18	Kab Jombang		13	5	1	3
19	Kota Madiun		9	7	3	1
20	Kab Jember		17	15	2	4
21	Kab Madiun		9	2	4	5
22	Kota Batu		15	9	2	4
23	Kab Banyuwangi		12	11	4	4
24	Kota Blitar		5	8	4	7
25	Kab Situbondo		7	3	4	4
26	Kab Magetan		4	4	4	2
27	Kab Ngawi		9	5	2	2
28	Kab Blitar		12	12	4	5
29	Kab Bondowoso		8	8	3	2
30	Kab Sumenep		6	5	4	1
31	Kab Malang		12	6	3	3
32	Kab Mojokerto		4	5	4	3

33	Kab Bangkalan		6	5	4	7
34	Kab Ponorogo		5	5	4	4
35	Kab Pacitan		8	4	1	3
36	Kota Kediri		12	5	4	7
37	Kab Pamekasan		7	6	2	2
38	Kab Lumajang		11	3	4	3
39	Kab Bojonegoro	2022	11	9	1	6
40	Kota Probolinggo		5	5	4	2
41	Kota Surabaya		11	9	4	3
42	Kab Tuban		6	6	4	3
43	Kab Tulungagung		14	9	4	0
44	Kab Trenggalek		6	8	4	8
45	Kab Pasuruan		12	6	4	11
46	Kab Lamongan		12	7	4	8
47	Kota Pasuruan		11	7	2	3
48	Kab Gresik		16	7	4	3
49	Kota Malang		16	5	4	3
50	Kab Sidoarjo		25	7	4	12
51	Kota Mojokerto		3	2	4	0
52	Kab Probolinggo		11	5	4	2
53	Kab Nganjuk		13	7	4	10
54	Kab Sampang		18	8	2	1
55	Kab Kediri		10	4	2	1
56	Kab Jombang		7	3	2	6
57	Kota Madiun		9	5	3	4
58	Kab Jember		11	6	4	7
59	Kab Madiun		11	9	4	4
60	Kota Batu		19	10	4	3
61	Kab Banyuwangi		11	3	4	6
62	Kota Blitar		8	4	4	5
63	Kab Situbondo		14	12	4	4
64	Kab Magetan		8	5	2	2
65	Kab Ngawi		8	4	2	1
66	Kab Blitar		9	3	4	3
67	Kab Bondowoso		14	8	3	4
68	Kab Sumenep		16	11	4	1
69	Kab Malang		7	7	3	6
70	Kab Mojokerto		10	4	4	4

71	Kab Bangkalan		14	4	4	3
72	Kab Ponorogo		11	6	4	3
73	Kab Pacitan		7	3	1	6
74	Kota Kediri		9	4	4	2
75	Kab Pamekasan		11	3	4	3
76	Kab Lumajang		11	3	4	2
77	Kab Bojonegoro	2023	4	18	1	2
78	Kota Probolinggo		10	4	4	4
79	Kota Surabaya		7	7	4	18
80	Kab Tuban		9	9	4	3
81	Kab Tulungagung		11	4	4	2
82	Kab Trenggalek		7	1	4	5
83	Kab Pasuruan		4	11	4	9
84	Kab Lamongan		5	10	4	5
85	Kota Pasuruan		18	18	2	10
86	Kab Gresik		5	15	4	4
87	Kota Malang		8	8	4	2
88	Kab Sidoarjo		6	13	4	3
89	Kota Mojokerto		9	9	4	7
90	Kab Probolinggo		5	9	4	1
91	Kab Nganjuk		4	7	4	2
92	Kab Sampang		4	10	2	0
93	Kab Kediri		3	8	4	6
94	Kab Jombang		4	6	4	1
95	Kota Madiun		10	10	4	6
96	Kab Jember		4	11	4	6
97	Kab Madiun		3	5	4	3
98	Kota Batu		6	5	4	8
99	Kab Banyuwangi		4	12	4	2
100	Kota Blitar		8	9	4	3
101	Kab Situbondo		5	12	4	11
102	Kab Magetan		4	7	4	0
103	Kab Ngawi		3	3	2	3
104	Kab Blitar		4	7	4	1
105	Kab Bondowoso		3	5	3	4
106	Kab Sumenep		8	2	4	10
107	Kab Malang		4	3	4	1
108	Kab Mojokerto		4	6	4	5

109	Kab Bangkalan		4	12	4	7
110	Kab Ponorogo		4	5	4	4
111	Kab Pacitan		4	7	1	3
112	Kota Kediri		11	3	4	4
113	Kab Pamekasan		4	9	4	1
114	Kab Lumajang		4	13	4	3

### Lampiran 3: Output IBM Spss

#### 1. Statistik Deskriptif

##### Hasil Uji Statistik Deskriptif

###### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	114	3	25	8,76	4,279
FIND	114	1	19	7,19	3,560
TRANS	114	1	4	3,46	0,951
CORRUPT	114	0	18	3,89	2,937
Valid N (listwise)	114				

#### 2. Uji Asumsi Klasik

##### a) Uji Normalitas Data

##### Hasil Uji Normalitas Data

###### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	1
Most Extreme Differences	Absolute	0,121
	Positive	0,106

Negative	-0,121
Kolmogorov-Smirnov Z	1,231
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,097

- a. Test distribution is Normal.  
 b. User-Specified

### b) Uji Multikolonieritas

#### Hasil Uji Multikolonieritas

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics		VIF
	Tolerance		
1 SPI	0,965		1,037
FIND	0,962		1,039
TRANS	0,998		1,002

a. Dependent Variable: CORRUPT

### c) Uji Heteroskedastisitas

#### Hasil Uji Glejser

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,467	0,224			2,088	0,039
SPI	-0,002	0,010	-0,018	-0,170	0,865	
FIND	0,012	0,012	0,109	1,067	0,288	
TRANS	0,002	0,052	0,004	0,042	0,967	

a. Dependent Variable: ABS\_RES

#### d) Uji Autokorelasi

##### Hasil Uji Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.190 <sup>a</sup>	0,036	0,010	2,922	2,149

a. Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND

b. Dependent Variable: CORRUPT

### 3. Analisis Regresi Linier

##### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		Std. Error	Beta				
1 (Constant)	1,678	0,478					0,001
SPI	0,072	0,027	0,236	2,689	0,008		
FIND	0,030	0,032	0,081	0,918	0,361		
TRANS	-0,403	0,102	-0,340	-3,939	0,000		

a. Dependent Variable: CORRUPT1

#### 4. Uji Statistik

##### a) Uji Simultan

##### Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	35,284	3	11,761	8,192	<,001 <sup>b</sup>
Residual	157,922	110	1,436		
Total	193,206	113			

a. Dependent Variable: CORRUPT1

b. Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND

##### b) Uji Parsial

##### Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,678	0,478				0,001
SPI	0,072	0,027	0,236	2,689	0,008	
FIND	0,030	0,032	0,081	0,918	0,361	
TRANS	-0,403	0,102	-0,340	-3,939	0,000	

a. Dependent Variable: CORRUPT1

### c) Uji Koefisien Determinan

#### Hasil Uji Koefisien Determinan (Adjusted R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 <sup>a</sup>	0,183	0,160	1,198

a. Predictors: (Constant), TRANS, SPI, FIND

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Tuti Agustin

Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 20 Agustus 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Krajan 1, RT 001/RW 001, Desa Cigugur, Kec. Pusakajaya Kab. Subang

Agama : Islam

No. HP : 089515431247

Kewarganegaraan : WNI

e-Mail : [tutiagustin66@gmail.com](mailto:tutiagustin66@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :  
1. SDN Cigugur  
2. SMPN 1 Astanajapura  
3. SMK Bina Cendekia Cirebon

Riwayat Organisasi :  
1. KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal)